

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN
PNPM MANDIRI PROSPEK DI KAMPUNG PASIR PUTIH
DISTRIK YAPEN SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
(Suatu Tinjauan Terhadap Peraturan Gubernur no. 86 Tahun 2015)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SINCE ATHA WIHYAWARI

NIM. 500660927

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRAK**STRATEGI PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN PNPM MANDIRI
PROSPEK DI KAMPUNG PASIR PUTIH DISTRIK YAPEN SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN****SINCE ATHA WIHYAWARI
NIM. 500660927**

Program PNPM Mandiri Prospek merupakan sebuah program pemberdayaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perwujudan dari Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang menitik beratkan pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat asli Papua khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang adil dan bermamfaat langsung bagi masyarakat. Program ini merupakan program pemberdayaan yang sistim Pengelolaan dananya sejak tahun 2014 sudah tidak lagi membiayai program-program pembangunan di tingkat kampung yang bersifat fisik (infrastruktur), melainkan titik sasaran yang dikedepan untuk dibiayai oleh dana pada program ini adalah ekonomi produktif dengan sistim pengelolaan dana secara bergulir dari satu kelompok penerima manfaat kepada penerima manfaat yang lain secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur dalam perencanaan program ini.

Kata Kunci : Kemandirian masyarakat menunjukkan sebuah keberhasilan pembangunan



ABSTRACTEDLY**MANAGEMENT STRATEGY LENTS FUND PNPM'S EMPOWERMENT
PROSPECT INDEPENDENT AT SAND KAMPONG TURNS WHITE YAPEN'S
CANTON REGENCY SOUTH YAPEN'S ARCHIPELAGO****SINCE ATHA WIHYAWARI
NIM. 500660927**

PNPM'S program Prospect Independent constitutes one empowerment program that is plotted and performed by government as shaped as realization of number Law 21 Years 2001 about special autonomy for Papuan Province that menitik Programs PNPM Prospect Independent constitutes one empowerment program that is plotted and performed by government as shaped as realization of number Law 21 Years 2001 about special autonomy for Papuan Province that menitik lifts the weight development performing be led to meet the need Papuan original society basic in particular and Papuan Province resident in a general way with notice pelestarian's principles environmentally, fair extended development and useful direct for society. This program constitute empowerment program that sistim its fund Management since year 2014 have no longer fund development program at level village which gets physical character(infrastructure), but target dot that at to the fore to be funded by fund on programs it is economic productive with system management lents fund go ala of one benefit receiver group to the other benefit receiver on an ongoing basis and continual through step and mechanism already be managed is in contemplation this program.

Key word: Society independence points out one development success



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK


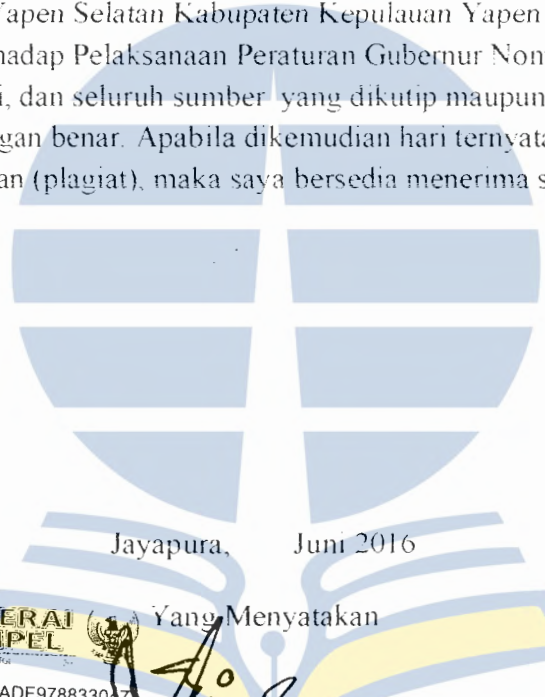
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
Strategi Pengelolaan Dana Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek di Kapung Pasir Putih Distrik
Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen
(Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2015)
Adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya
nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jayapura, Juni 2016

Yang Menyatakan

E ATHA WHYAWARI
NIM. 500660927



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Strategi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Prospek Di
Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten
Kepulauan Yapen

Penyusun TAPM : Since Atha Wihyawari

NIM : 500660927

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/ Tanggal : Minggu, 05 Juni 2016

Menyetujui

Pembimbing II

Dr. YUMIATI, M.Si.
NIP.19650731 199103 2 001

Pembimbing I

Dr. YOSEPHINA OHOIWUTUN, M.Si
NIP. 19610618 198902 2 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. NGADISAH, M.A
NIP.19510703 197903 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana

Dr. DARMANTO, M.Ed
NIP.19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana

SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP.19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Since Atha Wihyawari
 NIM : 500660927
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Strategi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Prospek Di
 Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten
 Kepulauan Yapen

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
 Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Pada

Hari/ Tanggal : Minggu, 05 Juni 2016
 Waktu : 09.30 - 11.00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Dr. darmanto, M.Ed.

Tandatangan

Penguji Ahli
 Prof. Dr. Ngadisah, M.A.

Pembimbing I
 Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si

Pembimbing II
 Dr. Yumiati, M.Si

KATA PENGANTAR

Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya yang tidak pernah berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan tulisan kualitatif yang berjudul : “Strategi Pengelolaan Dana Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2015) ”.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian dari tugas akhir pendidikan jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Reguler UPBJJ – Jayapura.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Yoshepina Ohoiwutun, M.Siselaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan studi akhir ini.
2. Ibu Dr. Yusmiati, M.Si selaku Pembimbing II dan Kepala UPBJJ-UT Jayapura yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan studi akhir ini.
3. Ibu Dra. Suratni, M.Si selaku tenaga administrasi Program Studi S2 MAP UPBJJ-UT Jayapura yang selalu memberikan motivasi dan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas penulisan studi akhir ini.
4. Bapak Johannes Ken Renmaur, S.IP, M.Si selaku Matan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Yapen sebagai Penggagas terselenggaranya Program S2 Manajemen Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta Kelas Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen

5. Bapak D. Kamarea, SH selaku mantan Kepala Distrik Yapen Selatan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program S2 Manajemen Administrasi Publik (S2-MAP).
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memberikan dukungan berupa bantuan dana guna membantu penulis dalam menyelesaikan tahapan akhir study.
7. Kepala Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan yang telah memberikan Ijin kepada Penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kampung Pasir Putih.
8. Teman-teman se-angkatan Kelas Reguler Program Studi S2 MAP-UT Jayapura dan Angkatan I-II Program Studi S2 MAP-UT Kelas Serui yang telah memberikan semangat, bantuan dan kerjasama dalam proses perkuliahan sampai dengan penulisan studi akhir ini.
9. Kedua Buah Hati Tercinta HENRRY dan DEVON yang selalu dengan setia dan sabar menunggu serta menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari setiap akademisi dan birokrat guna perbaikan.

Akhir kata, jasa baik dan kerja kita pasti diberkati Tuhan.

Jayalah Universitas Terbuka, Jayalah Dunia Akademik.

Jayapura, Juni 2016

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Nama : SINCE ATHA WIHYAWARI
 NIM : 500660927
 Program Studi : Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (MAP – UT)
 Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 18 Juni 1972

Riwayat Pendidikan :

Lulus SD di Serui- Papua		Tahun 1985
Lulus SMP di Serui - Papua		Tahun 1988
Lulus SMEA di Serui– Papua		Tahun 1991
Lulus D-III Ilmu Pemerintahan Uncen		Tahun 2001
Lulus S1 IlmuKes-Sosial Uncen		Tahun 2009

Riwayat Pekerjaan :

Tahun	1993	s/d	1994	sebagai	CPNS/PNS pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Yapen Waropen
Tahun	1997	s/d	2001	sebagai	PNS Tugas Belajar D-III Pemerintahan Uncen Jayapura di Jayapura
Tahun	2001	s/d	2008	sebagai	PNS pada Bagian Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten yapen Waropen
Tahun	2008	s/d	2009	sebagai	PNS Ijin belajar Transfer S1 Ilmu Kesos pada Uncen Jayapura
Tahun	2009	s/d	2010	sebagai	PNS (Staf) pada Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kab. Kepulauan Yapen
Tahun	2010	s/d	2012	sebagai	Sekretaris kelurahan serui jaya Kab. Kepulauan Yapen
Tahun	2012	s/d	2015	sebagai	Kepala Kelurahan Serui Jaya Kab Kepulauan Yapen.
Tahun	201	s/d	Sekarang	sebagai	Kembali dilantik sebagai kepala Kelurahan Serui jaya Kab.. Kepulauan Yapen di Serui

Jayapura, Juni 2016

SINCE ATHA WIHYAWARI
NIM. 500660927

DAFTAR ISI

Abstract	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	09
B. Identifikasi Masalah	10
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian terdahulu	19
B. Kajian Teori	67
C. Kerangka Pikir	67
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Tipe atau Metode Penelitian	69
B. Fokus Penelitian	71
C. Lokasi Penelitian	71
D. Instrumen Penelitian	72
E. Jenis dan sumber data	72
F. Informan Penelitian	74
G. Metode Pengumpulan Data	77
H. Metode Analisa Data	77
I. Validitas Data	77
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Hasil	91
B. Data dan Pembahasan	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. Kesimpulan	108
B. Saran	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 dan 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 s/d 16 Transkrip Wawancara

Lampiran 17 Ijin Penelitian

Lampiran 18 Identitas Informan

Lampiran 19 Dokumentasi Pengambilan Data (wawancara Mendalam)

Lampiran 20 Bagan Struktur Pemerintah Kampung Pasir Putih



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Kelurahan Dan Kampung Pada Distrik Yapen Selatan80
Tabel 4.2	Luas Dan bentuk Wilayah Distrik Yapen Selatan81
Tabel 4.3	Jumlah Bangunan Sekolah TK dan SD Se- Distrik Yapsel82
Tabel 4.4	Jumlah Bangunan SMP dan SMA83
Tabel 4.5	Jumlah Guru pada tingkat pendidikan di Distrik Yapen Selatan84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Strategi menurut Robins (1990)	22
Gambar 3.1	Model Animasi Kepemimpinan	41
Gambar 3.2	Kerangka Pikir	67
Gambar 4.1	Peta Kepulauan Yapen	79
Gambar 4.1	Alur Tahapan Pelaksanaan	89



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Tujuan Pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata material maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya terkandung maksud pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional, oleh sebab itu fungsi pemerintah pada umumnya berupa penyediaan pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan.

Dilihat dari tujuan Pembangunan Nasional yang ada maka peranan dan fungsi Pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai ketinggian kampung sangat diperlukan guna terwujud tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri. Dan untuk mewujudkan itu, negara dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selalu mengedepankan asas desentralisasi/dekosentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip asas desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan di daerah sebagai rambudalam memberikan pelayanan, peninngkatan peran,

serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat

Bertolak dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya di daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan pengertian Desa/Kampung itu sendiri menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi luas, dalam hal ini daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan kekhususan dan keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman. Dalam upaya terwujudnya kesejahteraan dibutuhkan adanya pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah

Untuk mewujudkan pemberdayaan kesejateraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Penataan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan kampung atau pembangunan masyarakat kampung adalah suatu proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di kampung/ dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan kemandirian melalui swadaya gotong royong masyarakat. Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung dapat melalui peningkatan koordinasi pengembangan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam serta menumbuhkan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya serta partisipasi masyarakat.

Program PNPM Mandiri Prospek merupakan sebuah program pemberdayaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perwujudan dari Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang menitik beratkan pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat asli Papua khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang adil dan bermamfaat langsung bagi masyarakat.

Program ini merupakan program pemberdayaan yang sistem Pengelolaan dananya sejak tahun 2014 sudah tidak lagi membiayai program-program pembangunan di tingkat kampung yang bersifat fisik (infra struktur), melainkan titik sasaran yang dikedepan untuk dibiayai oleh dana pada program ini adalah ekonomi produktif dengan sistem pengelolaan dana secara bergulir dari satu kelompok penerima manfaat kepada penerima manfaat yang lain secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur dalam perencanaan program ini.

Tujuan pemberian dana langsung masyarakat Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan kampung adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sumber daya lokal baik potensi maupun kapasitas masyarakat di kampung, meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal milik masyarakat. Meningkatkan standar hidup (*Level of life*) penduduk asli Papua baik di pandang dari sisi pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang papan, pelayanan kesehatan, pendidikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif di tingkat kampung. Memberdayakan masyarakat kampung melalui deseminasi peningkatan kegiatan usaha produktif yang kreatif, Menciptakan atau menambah kemampuan (keahlian) penduduk asli papua dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif di tingkat kampung baik sisi produksi maupun pemasaran. Mempertahankan atau menjaga kelestarian budaya asli dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, dan melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diatur dengan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua. Esensi pemberlakuan otonomi khusus adalah merubah paradigma dan gaya pemerintahan sentralistik dan ekonomi kapitalis menuju kepada pemerintahan lokal yang partisipatif-demokratis dan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh kekuatan kearifan lokal. Kewenangan yang besar di dalam undang-undang Otonomi Khusus memberikan sinyal bahwa masyarakat local dan asli pribumi papua harus ditumbuhkembangkan dan diberdayakan semaksimal mungkin

Visi Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, yakni menjadikan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Tentu saja visi ini harus dicapai dalam masa kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur. Oleh sebab itu rancangan program dan kegiatan pembangunan provinsi dimanifestasikan dalam program-program prioritas. Salah satunya adalah strategi Pembangunan ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek). Prospak ini memiliki substansi pilar-pilar reformasi pelaksanaan pemerintahan fiscal daerah seperti demokrasi, desentralisasi dan partipasi masyarakat. Prospek diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk implemmentasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui prospek, maka Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Peraturan Gubernur provinsi Papua Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dana

Program Strategis Pambanunan ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun Anggaran 2015.

Sumber dana PMPN Mandiri Prospek berasal dari APBN berupa gaji dan tunjangan pendamping, pelatihan petugas pendamping, dana mobilisasi dan relokalisasi pendamping. Kemudian dari APBD Provinsi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan juga sumber dana dari lembaga lain untuk mendukung BLM Program PNPM Mandiri Prrospek dalam pengelolaan dan pelaksanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang dianut, serta jenis-jenis kegiatan yang akan telah dttapkan dalam program ini yang nantinya akan dibiayai melalui dana prospek dimaksud. Pelaku Program PNPM Mandiri Prospek ini secara berjenjang mulai dari pelaku yang ada di provinsi yaitu Gubernur, tim koordinasi PNPM dan koordinator manajemen, sedangkan dikabupaten yaitu Bupati, Tim koordinasi PNPM Mandiri tingkat kabupaten dan pendamping kabupaten kemudian tingkat distrik yaitu kepala distrik, Penanggung jawab operaasional kegiatan (PJOK), tim pengelola kegiatan distrik (TPKD) dan pendamping distrik (PD), sedangkan pelaku di tingkat kampung adalah kepala kampung, tim tiga tungku, tim pelaksana kegiatan kampung (TPKK), pendamping kampung (PK) tim penulis usulan (TPU) tim verifikasi (TV). Pelaku sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan komponen pelaksana program yangn sangat ikut menentukan keberhasilan pogram, namun secara tekhnis dilapangan dalam pengelolaan dana mulai usulan program sampai dengan pencairan dana, penggunaan dan meempertanggung jawabkan tim pelaksana kegiatan kampung lah sangat mempunyai peran penting dangan tetap berkoordinasi dan diawasi oleh kepala kampung sebagai pelaku prograam di tingkat paling rendah .

Tim Pelaksana kegiatan kampung (TPKK) adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk mengelola dan melaksanakan tahapan kegiatan, dengan susunan kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara ditambah ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai program jika memang diperlukan. Dengan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelolah Kegiatan kampung adalah

- a. Melaksanakan setiap tahapan proses perencanaan kegiatan secara transparan dan melibatkan peran serta masyarakat termasuk kelompok miskin dan perempuan.
- b. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai secara terbuka dan melibatkan masyarakat meliputi:
 - Membuat rencana kerja detail dan rencana penggunaan dana untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan
 - Menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku sistim mekanisme dan prosedur Pengelolaan dana Pembangunan Kampung dan penjelasannya, antara lain pembuatan surat-surat perjanjian, penarikan dan penggunaan dana.
 - Membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengatur tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan
 - Melaksanakan pemeriksaan hasil kerja, penerimaan bahan mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan pembayaran dari pendamping distrik.
 - Melakukan pengawasan dan mengendalikan kualitas pekerjaan.

- Menyiapkan kelengkapan dokumen Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan diajukan kepada PJOK untuk diadakan pemeriksaan lapangan.
- c. Menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka revisi kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan.
- d. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban dana dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah kampung dan menempelkan di papan-papan informasi.
- e. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggung jawaban seluruh penggunaan dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan musyawarah kampung.
- f. Membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK
- g. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan program. Rencana tersebut harus dilengkapi dengan rencana kerja kelompok pemakai dan pemelihara serta nama penanggung jawabnya

Tugas dan tanggung jawab ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek oleh Tim Pengelola Kegiatan Kampung, yang kelihatan sudah sangat ketat namun kalau dipadukan dengan kenyataan di lokus penelitian maka sepertinya ada gap, antara dasein dan dasolen dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui sumber dana PNPM Prospek . Skalaupun dana ini di urus dengan sejumlah pelaku yang telah kami uraikan diatas dengan mekanisme dan alur yang cukup terencana

dengan baik, namun kondisi nyata yang kami jumpai pada locus penelitian, sepertinya pekerjaan pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek dalam membiayai program-program kegiatan yang telah direncanakan ini belum berjalan dengan baik. Tim Pelaksana Kegiatan Kampung sepertinya belum terlalu melibatkan masyarakat dalam menentukan apa kegiatan yang menjadi kebutuhan mendesak yang ada di tingkat kehidupan masyarakat itu sendiri. Kepala kampung sebagai pucuk pimpinan di tingkat kampung sebagai pembimbing, pengendali dan pengawas bersama bamuskam sepertinya kurang dilibatkan dalam pengelolaan program-program kegiatan di tingkat kampung Pasir Putih Diatrik Yapen Selatan.

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Kabupaten Kepulauan Yapen adalah kurangnya sosialisasi dan transparansi dalam melibatkan masyarakat yang ada. Sehingga program terkesan dilaksanakan oleh Kepala Kampung dan aparatur kampung, sedangkan masyarakat kurang mengetahui dan terlibat secara maksimal dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan kondisi riil di lapangan penulis berasumsi bahwa diperlukan strategi yang harus dipikirkan dan dikoordinasi dengan baik sehingga lebih tepat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana untuk membiayai program kegiatan yang ada, sehingga tidak terkesan kegiatan Program PNPM ini hanya dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan Kampung saja, tanpa melibatkan pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dana ini. Misalnya partisipasi masyarakat, peran kepala kampung sebagai pemimpin tapi juga bamuskam.

Strategi yang digunakan tanpa terikat dengan mekanisme yang telah baku dalam pengelolaan program ini, terkait dengan penggunaan dana dalam pembiayaan kegiatan tersebut. Menurut Muhammad Qudrat Nugraha (2010) “Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.”

Berdasarkan temuan permasalahan penelitian yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang strategi apa yang lebih tepat yang dapat di pakai oleh pelaku program di kampung ini agar pengelolaan dan PNPM Prospek di kampung sambarwai bisa benar-benar nampak dan menjawab kebutuhan masyarakat, untuk itu peneliti menetapkan judul penelitian “STRATEGI PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN PNPM MANDIRI PROSPEK DI KAMPUNG PASIR PUTIH DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menampilkan identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Prospek yang dilakukan di Kampung pasir Putih Distrik Yapen Selatan. Pengelolaan ini diukur dari bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan sampai

pada evaluasi hasilnya. Apakah tercapai sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan

2. Bagaimana penyerapan anggaran dan konversi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan ? tentu saja terdapat kejanggalan atau deskrapansi dalam pencapaian tujuan. Hal ini akan dianalisa sedalam mungkin dengan uji kualitatif terhadap semua data yang diambil, baik data primer dan data sekunder serta data-data pendukung lainnya guna memperoleh jawaban yang kualitatif. Masalah perencanaan akan melibatkan lapisan stakeholder yang berada dan bersangkutan dengan aktor di kampung, yaitu antara lain, Aparat Pemerintahan Kampung, Bamuskam dan Masyarakat dan pendamping dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Yapen.
3. Adanya data-data dasar sebagai alat ukur perencanaan dan hasil program/kegiatan. Untuk program kegiatan, diperlukan data selain dari masyarakat, juga dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Untuk pelaksanaan program atau penggerakan kegiatan, diperlukan keterlibatan masyarakat dan aparatur kampung untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kampung tersebut dan akhir dari proses pengelolaan dana tersebut, diperlukan pengawasan yang efektif dari pengawas internal maupun Bamuskam dalam melaksanakan fungsi kontrol pemerintahan kampung. Pertanyaan mendasar dari semua kajian teori di atas adalah apakah proses pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek sudah berjalan secara efektif dan efisien ?

C. Perumusan Masalah

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya menurut Winarno Surachmad (1978:34), dan menurut Sugiyono (1993:53) masalah adalah Penyimpangan antara yang sebenarnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Dari fakta yang ada, pada taraf kehidupan ekonomi lemah, mereka sangat susah dalam membangun kehidupan ekonomi mereka, kehadiran program bantuan dana stimulant pemberdayaan kampung ini sesungguhnya merupakan sebuah solusi yang dilakukan Pemerintah untuk merubah pola hidup mereka. Atas dasar pemikiran itulah maka dari sekian permasalahan yang telah diidentifikasi yang ingin penulis ingin melakukan penelitian secara detail untuk mengetahui dan menganalisa

- a. Bagaimana pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan ?
- c. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa

- a. Bagaimana pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan ?
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan ?
- c. Strategi apa yang harus yang dilakukan untuk mengembangkan program PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini adalah :

- a. Kegunaan secara ilmiah adalah memberikan kontribusi bagi keilmuan, khusus teori-teori manajemen dan pengelolaan keuangan Negara serta memberikan referensi bagi peneliti lain yang hendak meneliti di bidang tersebut;
- b. Kegunaan secara praktisi adalah memberikan masukan bagi pemerintahan kampung guna memperbaiki penatalayanan dan pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek pada kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kampung Pasir Putih di waktu yang akan datang.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu.

Penelitian tentang Strategi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Propek dalam hubungannya dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta disiplin ilmu yang ada keterkaitannya telah diangkat oleh beberapa peneliti antara lain .

1. Marthén Edi (2013) Tesis Sosiologi Universitas Cenderawasi dengan judul “ Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat kampung terhadap Peningkatan Kesejahteraan di Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi Metode Peenelitian kualitatif dengan analisis deskriptif Hasil penelitian menunjukkan implementasi dana perberdayaan masyarakat ke kampung kasukwe dapat memberikan nilai tambah yang sangat positif secara perlahan-lahan dan bertahap pada beberapa aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur serta pengembangan kelembagaan kampung walaupun belum signifikan karena pelaksanaan dilapangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena dana yang disalurkan tidak dimanfaatkan 100% sesuai peruntukannya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Lekiuw Yikwa (2014) dalam penelitian dengan judul “ Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Tagime Kabupaten Jaya wijaya “ Dalam penelitian Tesisnya

Yikwa menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat Dani dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan kemitraan dengan kelompok-kelompok yang telah ada di masyarakat dan juga pemerintah sehingga sasaran pemberdayaan yang di mulai dari pendekatan individu, keluarga, kelompok sehingga masyarakat mampu merubah pola dan budaya hidup mereka menjadi berdaya.

3. Didi Djunaedi (2013) dalam penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Seruyan ”

Tesisnya Didi menunjukkan bahwa untuk penanggulangan masalah kemiskinan yang merupakan sumber dari segala masalah sosial yang sementara berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sering termajinalkan itu, membutuhkan sebuah implementasi kebijakan yang tepat.

4. Viktor Auparai (2016) dalam penelitian dengan judul “ Kinerja Kepemimpinan Kepala kampung Dalam Rangka Pengelolaan Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) di kampung Traimelyan di distrik Skamto Kabupaten Keerom.

Tesis ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan Program pemberdayaan baik kegiatan maupun keuangan sangat ditentukan juga oleh kinerja kapala kampung sebagai pemimpin di wilayah kampung tersebut.

5. James Erik Siagian (2007), Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan tesis yang berjudul : “Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang”. Tesis ini berisi tentang masalah kemiskinan menjadi isu utama di Kabupaten Deli Serdang. Dengan mengambil sampel di beberapa kecamatan seperti STM Hulu dan Pantai Labu telah memberikan gambaran bahwa salah satu indikator pengentasan kemiskinan adalah dengan melalui dana pemberdayaan masyarakat. sehingga masalah-masalah yang dihadapi, seperti peningkatan ekonomi rakyat, pertanian, industri rumah tangga, dapat ditumbuhkembangkan.
6. Sukmaniar (2007), Mahasiswa Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota pada Universitas Diponegoro Semarang, menulis Tesis dengan judul : “Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat pasca tsunami, mekanisme program pengembangan kecamatan dan pengelolaan program pengembangan kecamatan yang dilaksanakan. Kemudian mengukur bagaimana keberadaan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan kecamatan sebelum dan sesudah ada program tersebut. Substansi dari penulisan ini adalah mengukur efektifitas dari program PPK tersebut, apakah program ini efektif dilaksanakan, atau belum, kemudian mendefinisikan masalah dan pemecahannya.

7. Devi Deswimar (2014), Jurnal *El-Riyasah*, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2014, dengan judul : “Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Perdesaan”. Jurnal ini bersisi tentang Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterletarbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Artinya program pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang sangat mementingkan kebutuhan masyarakat pedesaan.
8. Drs. Entang Adhy Muhtar, M Si (2008), Jurnal *Manejerial (Manajemen dan Sistem Informasi)* Vol. 6 Nomor 12, Januari 2008. Jurnal ini berisi

tentang Kebijakan desentralisasi telah memberikan tawaran baru bagi bangkitnya skema politik yang lebih demokratis dan membawa penyelamatan atas tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang lebih kondusif. Realita tersebut, tentu saja bisa bermakna sebagai ancaman dan sekaligus peluang bagi upaya membangun agenda-agenda perubahan yang hendak dicapai bagi bangsa Indonesia. Sebab agenda desentralisasi tidak serta merta mengusung semangat demokrasi yang mampu memberdayakan masyarakat. Diakui bahwa Indonesia tengah membangun, namun persoalan yang dihadapi bahwa percepatan pembangunan tidak diikuti tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi (31,1 juta jiwa atau 15,97%), Index Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang rendah (pada kisaran 110 dari 177 negara dengan nilai IPM 0,697) masih di bawah peringkat negara-negara ASEAN (Menko Kesra, 2006:7). Hal ini merupakan indikasi yang dapat menimbulkan kerentanan kehidupan sosial politik dan budaya masyarakat dan negara. Strategi pemberdayaan dalam pembangunan desa menawarkan suatu alternatif pemikiran tentang perubahan dalam tatanan masyarakat berupa munculnya inisiatif lokal, peningkatan partisipasi dan desentralisasi, terutama pengalokasian kembali sumber-sumber daya yang ada melalui pengembangan institusi lokal dan kelompok dalam masyarakat. Ketidakberdayaan masyarakat untuk mengakses terhadap sumber-sumber informasi dan pelayanan yang tidak kondusif, menjadikan masyarakat desa dan lembaga-lembaga lokal yang menaunginya tetap berada pada posisi yang termarginalkan. Problem

seperti ini perlu dijawab dengan sejumlah tindakan penyelamatan bagi terbentuknya suasana dan tatanan baru yang lebih bermakna bagi masyarakat melalui proses belajar yang berkelanjutan.

9. Hery Budiyanto (2011), *Local Wisdom* Jurnal Volume: III, Nomor: I, Halaman: 34 - 40, Februari 2011, dengan judul Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Jurnal ini berisi tentang pengertian dari Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah pengertian dari program tatanan kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjatidiri dan berkelanjutan yang direncanakan, dipasarkan dan dibangun sepenuhnya oleh partisipasi masyarakat Desa. Dalam program ini terdapat peran "pendamping" yaitu Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) yang fungsinya bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain menjadi "fasilitator" dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional, sesuai dengan potensi, masalah dan keinginan masyarakat. Pendekatan partisipatif merupakan salah satu model pendekatan untuk mengakomodasikan pengetahuan lokal, kebiasaan lokal dan budaya lokal masyarakat. Kearifan budaya lokal dalam pembangunan permukiman di pedesaan menjadi penting sebagai upaya untuk mengeliminir kesenjangan budaya dalam proses membangun Penataan lingkungan permukiman

berbasis komunitas di desa gudang merupakan contoh kasus pentingnya pemahaman kearifan lokal dalam proses membangun komunitas

10. Ania Maharani, SKM (2012), Artikel Pemberdayaan Masyarakat. substansi dari artikel ini adalah memberikan pengertian dasar dari pemberdayaan, tujuan dan ruang lingkup dari pemberdayaan, proses pemberdayaan, unsur-unsur pemberdayaan, metode pemberdayaan dan contoh dari pemberdayaan. Artikel ini bertujuan memberikan pengertian teoritis dan pragmatis dari sebuah pemberdayaan masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesamaannya adalah sama-sama mengangkat isu-isu tentang pemberdayaan masyarakat, bagaimana program pembangunan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan rakyatlah yang akan menikmatinya. Selain itu penelitian-penelitian ini juga mengangkat peranan pemerintahan local dalam menunjang program pembangunan di tingkat bawah dalam struktur pemerintahan, yaitu kampung/desa. Posisi penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada pengelolaan atau manajemen yang telah dilakukan oleh pemerintahan kampung. Diantaranya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasinya. Penulis lebih memprioritaskan pada peran human capital atau human resources yang terlibat dalam pengelolaan PNPM Mandiri Prospek. Sedangkan prospek sendiri memiliki makna program pemberdayaan kampung, sehingga bagaimana kampung dapat berkembang dan maju dengan kinerja aparatur yang handal.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Strategi.

Secara umum Pengertian strategi adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan (*victory*) pencapaian tujuan (*to achieve goals*). Menurut *Carl Von Clausewitz dan Carl Philips Grottfried (1780-1831)* seorang strategi dan peperangan bahwa strategi adalah Penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan” *the use of engagements for the object of war*”. Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau policy merupakan hal yang terjadi setelah perang

Selanjutnya menurut *bussinesdistionary*, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah, pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Istilah strategi berasal dari kata Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan. Kemudian menurut *Henry Mintzbergh (1998)*, seorang ahli bisnis dan manajemen menyebutkan bahwa Pengertian Strategi terbagi atas 5 (lima) definisi yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sabagai posisi (*position*), strategi sebagai taktik (*ploy*) dan terakhir strategi sebagai perpesktif.

a. Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (*a directed conrce of action*) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan, sama halnya dengan konsep strategi perencanaan.

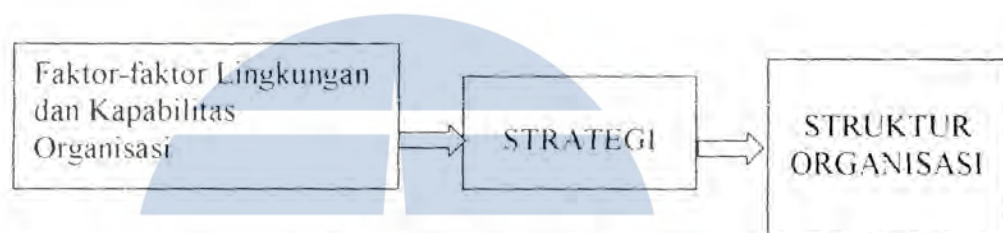
- b. Pengertian Strategi sebagai pola (*patteri*) adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran dari pada menggunakan yang terencana atau pun diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau bermaksud maka strategi sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja (*emergent*)
- c. Definisi strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk atau pun perusahaan dalam pasar, berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan sebuah strategi utamanya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal
- d. Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan.
- e. Pengertian strategi sebagai perspektif adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir atau pun ideologis.

Kemudian menurut *Craig dan Grant (1996)* Pengertian strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and long-term goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Selanjutnya menurut *Siagian (2004)* menyatakan bahwa Pengertian strategi adalah Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dan menurut Jhonson and scholes, bahwa pengertian strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi

dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumberdaya dalam lingkungan yang menantang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Strategi menurut Robins (1990), memiliki arti bahwa penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi.

Berikut ini gambar strategi menurut Robins sebagai berikut :



Gambar 2.1 Strategi menurut Robins (1990)

Dari gambar 2.1 dapat dianalisis bahwa faktor-faktor lingkungan dan kapabilitas organisasi sebagai input dalam sebuah system yang diproses sebagai sebagai sebuah strategi dan melahirkan struktur organisasi yang merupakan output dari strategi yang ada. Sehingga dengan kata lain, menurut Robins, struktur organisasi yang terbentuk merupakan output dari sebuah strategi dalam mencapai tujuan organisasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan,

dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, "Strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan". Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll

Demikian berbagai pendapat dari para sarjana tentang pengertian strategi yang dapat memberikan gambaran bahwa, strategi adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah manajemen organisasi publik. Tim Pengelola Kegiatan Kampung merupakan sebuah organisasi yang memerlukan strategi kerja, bersama dengan kepala kampung dalam pengelolaan dana pemberdayaan tersebut. Sebuah organisasi tanpa strategi sama dengan organisasi tersebut tidak akan mencapai sebuah kesuksesan yang merupakan tujuan organisasi. Pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek melalui organisasi di tingkat kampung selain TPKK sebagai tim teknis tapi juga secara tidak langsung ada peran pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung dan bamuskam.

Menurut Dracker dalam Wahyudi (1996), strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things) dan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar (doing the things right) Christopher Colombus berkeinginan menemukan jalan pintas (strategi) untuk menuju india dengan memutuskan untuk berlayar ke arah barat dari pada ke timur (taktik). Sedangkan menurut

Karl von Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan sebuah perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Dalam bisnis taktik merupakan sekumpulan program-program kerja yang dibentuk untuk melengkapi strategi bisnis. Kesimpulannya bahwa taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari strategi, agar strategi tersebut dapat diterapkan.

Sedangkan manajemen strategik menyangkut dua hal yang harus dilakukan oleh para manajer (pemimpin), yaitu memformulasikan strategi dan melaksanakan atau mengimplementasikan strategi dengan menggunakan taktik-taktik tertentu. Memformulasikan strategi menyangkut memilih strategi-strategi yang sudah dikenal ataupun menciptakan strategi-strategi baru. Formulasi strategi-strategi tersebut tidak lepas dari hasil pemantauan lingkungan organisasi yang dihadapi organisasi, baik eksternal maupun internal.

Dana Pemberdayaan PNPM Mandiri prospek merupakan dana yang diberikan untuk membiayai sejumlah program-program peningkatan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan, masyarakat perlu merubah pola hidup ekonomi mereka secara mandiri namun untuk sampai kesitu membutuhkan strategi yaitu pola pemberdayaan dengan taktik pendampingan/pembinaan dan pengawasan. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan ini sangat terkait erat sekali dengan manajemen ketua Tim Pengelola Kegiatan Kampung dan kepala kampung yang merupakan pelaku program yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut, untuk mencapai tujuan

dari program PNPM Mandiri Prospek dengan sejumlah dana yang telah tersedia maka membutuhkan strategi yang tepat dalam manajemen yang diperankan oleh ketua TPKK dan kepala kampung sebagai pengawas langsung. Strategi merupakan bagian dari sebuah proses manajemen kepemimpinan. Proses pendampingan/pembinaan serta pengawasan ini sangat menuntut keterlibatan komponen terkait yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana tersebut dan sejumlah program.

2. PNPM Mandiri Nasional

Sebelum peneliti memberikan kajian teoritis tentang PNPM Mandiri Prospek yang dilaksanakan oleh Gubernur Lukas Enembe di Provinsi Papua, maka peneliti terlebih dahulu memberikan pengertian PNPM Mandiri secara umum, sebagaimana program pembangunan nasional lainnya. Demikian pengertian, proses pengelolaan dan hasil PNPM Mandiri secara nasional yang dilaksanakan diberbagai Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa di Indonesia. Data dan informasi dari data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat

Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp. 750 juta sampai Rp. 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/lurah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif
- b. **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.

- c. Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- d. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
Partisipasi
- e. Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
- f. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- g. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- h. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- i. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK. Aku Lanjut dengan tagline: SiKOMPAK, Kunci Kemandirian Desa Kami. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud. Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri Perdesaan dinikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Sedangkan pada 2009, jumlahnya mencapai 50.201 desa dari 3.908 kecamatan di tanah air. Jumlah tersebut belum termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program-program lain yang melekat pada PNPM Mandiri Perdesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM-Respek), PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (PNPM-P2SPP), dan lain-lain.

Pada 2010, berdasarkan ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.
- b. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagagas masa depan desa, penggalan gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
- c. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan-- untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalan gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing.

untuk Menggagas Masa Depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

- d. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- e. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator

Teknis PNPB Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat.

- f. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk *trust funds* dan hibah dari berbagai negara/ lembaga penyandang dana. Hibah/ *trust funds* tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini.

Hasil dari PNPM Mandiri secara nasional dapat tergambar berdasarkan data dari PNPM Mandiri Nasional tahun 2007, sebagai berikut :

- a. PNPM Mandiri berhasil membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan baru. Data Bappenas 2007, kurang lebih 62,5 juta Hari Orang Kerja (HOK) melalui pekerjaan jangka pendek, dengan melibatkan lebih dari 5,5 pekerja yang berasal dari daerah dan harga setempat.
- b. Pembukaan usaha transportasi yang mendukung terlaksananya akses transportasi berupa sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan dermaga.

- c. Adanya pinjaman kepada pengusaha local dan pengusaha-kecil, sehingga dana dapat digunakan bagi pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- d. Keberhasilan program ini juga terlihat dari beberapa kecamatan yang melaksanakan program PNPM Mandiri terlihat lebih berhasil dan maju dibandingkan dengan kecamatan yang tidak melaksanakan program tersebut. arus barang dan jasa sangat kuat di daerah-daerah program PNPM Mandiri yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tingkat local, karena daya beli dan distribusi pendapatan masyarakat terjadi secara merata.
- e. Pemberdayaan jender juga terjadi di kecamatan-kecamatan yang melaksanakan program PNPM Mandiri tersebut. kaum perempuan diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan seperti jahit menjahit, tata boga (makanan), tata rias kecantikan, serta program pemberdayaan perempuan lainnya. Lintas program pemberdayaan perempuan dilaksanakan bersama dinas terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam mengoptimalkan pelayanan di kecamatan.
- f. Terjadinya peningkatan dalam kapasitas lokal, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa/kampung.
- g. Masyarakat Indonesia di lebih dari 34.100 desa telah turut berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menyangkut alokasi dana bagi pembangunan publik di desa masing-masing.
- h. Sekitar 62% dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin di

desanya, dan sekitar 70% tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan sarana/prasarana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari kelompok paling miskin.

- i. Partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri meningkat. Adanya pemberdayaan perempuan meningkatkan mutu pelayanan PNPM Mandiri.
- j. Rata – rata swadaya masyarakat secara keseluruhan adalah 17% dan bervariasi di tiap provinsi.
- k. Sebanyak 82% masyarakat lokal di lokasi PPK (kini bernama PNPM MPd) kini menyatakan telah memiliki kemampuan berorganisasi dan kapasitas diri berkat peningkatan kapasitas yang menyertai pelaksanaan. Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan lokasi PNPM MPd memiliki kinerja yang baik dan memadai, serta berpotensi untuk berkembang.
- l. Tingginya komitmen pemerintah dan kontribusi mencapai 40% dari kabupaten-kabupaten pada PPK II, PPK III, serta PNPM-PPK yang menyediakan dana bersama (matching grants) dan cost sharing untuk pelaksanaan program. Semua kabupaten di PPK III dan PNPM-PPK menyediakan dana dari anggaran daerah untuk pelaksanaan program.
- m. Akuntabilitas pemerintah dan peranan masyarakat madani lebih kuat. Konsultan dan jurnalis di provinsi PNPM MPd bertindak sebagai pengawas untuk memantau pelaksanaan PNPM MPd secara independen.
- n. Program telah membangun mekanisme yang memungkinkan ketegangan yang diredakan. Hal ini terbukti dari keberhasilan pelaksanaan program di lokasi konflik dan bencana.
- o. Rendahnya tingkat korupsi – Audit independen terhadap PPK yang dilaksanakan oleh Moores Rowland menemukan penyimpangan proyek desa

ini kurang dari 1% dari total dana yang telah disalurkan. Pada kenyataannya, sejak digulirkan pada 1998 hingga saat ini, penyimpangan dana dalam program yang menjunjung semangat transparansi dan akuntabilitas ini sangat rendah, hanya sekitar 0,18% dari total dana yang telah disalurkan

- p. Meningkatkan akses ke pasar, pusat kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih di lebih dari 56% desa termiskin di seluruh Indonesia. PNPM Mandiri Perdesaan (melalui PPK dan PNPm-PPK) telah mendanai lebih dari 171.466 kegiatan sarana/ prasarana perdesaan di lokasi program di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah daftar investasi PNPM Mandiri Perdesaan melalui PPK dan PNPm-PPK(2003)

- 32.572 jalan dibangun atau ditingkatkan
- 8.755 jembatan dibangun atau direkonstruksi
- 10.510 sistem irigasi dibangun
- 9.940 unit sarana air bersih dan 4.589 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) dibangun
- Untuk pendidikan, telah dibangun dan direnovasi sebanyak 6.411 sekolah, penyediaan alat dan materi penunjang belajar mengajar; diberikan lebih dari 117.270 beasiswa pendidikan untuk perorangan, dan mendanai 3.336 jenis kegiatan di bidang pendidikan lainnya
- Untuk kesehatan, telah dibangun dan direnovasi sejumlah 3.611 unit sarana dan pos kesehatan; serta mendanai 968 jenis kegiatan di bidang kesehatan lainnya.

- q. Tingginya tingkat pengembalian investasi menurut evaluasi ekonomi independen, bobot pengembalian investasi PNPM Mandiri Perdesaan berkisar

antara 39-68%. Evaluasi lainnya menyebutkan, rata-rata EIRR untuk total kegiatan adalah 60,1%. Keuntungan yang paling dirasakan adalah terbentuknya kegiatan ekonomi baru melalui prasarana yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan atau kapasitas produksi yang terbatas akhirnya dapat disalurkan ke pasar lokal.

- r. Penghematan biaya dalam jumlah signifikan Prasarana desa yang telah dibangun melalui metode PNPM Mandiri Perdesaan sangat hemat dalam pembiayaan. Rata - rata 56% lebih murah dari pekerjaan sejenis yang dibangun oleh pemerintah maupun kontraktor. Berdasarkan studi konsultan independen diketahui, 94% prasarana yang dibangun dinilai berkualitas baik dan sangat baik secara teknis.

3. **PNPM Mandiri Prospek Provinsi Papua**

Dana Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek merupakan sejumlah uang negara yang disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003 keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses dan tujuan, sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fisik, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara

yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- b. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Nagar/Daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.
- d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan, pemerintahan negara

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diwujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan keuangan PNPM Mandiri mengacu pada prinsip-prinsip keuangan negara dengan sejumlah fungsi otorisasi yang perlu ditaati oleh pengelola keuangan negara baik di tingkat APBN maupun APBD dalam berbagai bentuk perencanaan yang akan di gunakan.

Dana merupakan sejumlah uang yang disediakan untuk membiayai sejumlah kegiatan pembangunan yang direncanakan bersama masyarakat melalui forum mesrenbang dan telah ditetapkan kegiatannya beserta dananya melalui sidang anggaran. Yang pengelolaan keuangannya berjalan sesuai tingkatan kekuasaan yang mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, mulai dari Presiden sebagai pengelolah sampai ke tingkat kepala kampung dengan tetap mengacu pada aturan dan batas kekuasaan pengelolaan sesuai tingkatan dalam penggunaan uang negara untuk mencapai tujuan pembangunan negara dan masyarakat.

Dana Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek Merupakan uang negara yang diberikan dalam bentuk dana pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi Papua Kepada Tiap Kelurahan dan Kampung yang berada di tingkat kabupaten di wilayah Provinsi Papua.

Pemberian dana pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek ini merupakan perwujudan dari Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bersama rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Selain itu pemberlakuan Otonomi Khusus ini pada dasarnya ingin melakukan perubahan mendasar dari sistim pemerintahan yang sentralistik birokratik menjadi pemerintahan yang desentralisasi yang partisipatif, demokratis, transparan sesuai karakteristik masyarakat lokal.

Program Dana Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek ini diatur lebih lanjut Peraturan Gubeernur Papua nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan

Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun Anggaran 2015.

Pada dasarnya administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai dan merumuskan kebijaksanaan umum. Sedangkan manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang dirumuskan, hal ini berarti bahwa administrasi dan manajemen tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatan yang bersifat operasional, karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kelompok pelaksana, yang mana dana pemberdayaan PNPB mandiri prosoek juga dikelola oleh kelompok orang-orang yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dana. Sudah pasti ada kepala kampung dan ada ketua tim Pengelola kegiatan, dengan sendirinya ada sebuah proses manajemen yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan terkait dengan menentukan strategi manajemen. Tim Pengelola Kegiatan Kampung adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah kampung dan masyarakat melalui forum musyawarah kampung (muskam), oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu harus berkoordinasi dengan kepala kampung dan ketua bamuskam dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan setiap program-program kegiatan yang hendak dilaksanakan dalam hal ini ketua TPKK sebagai pimpinan tim.

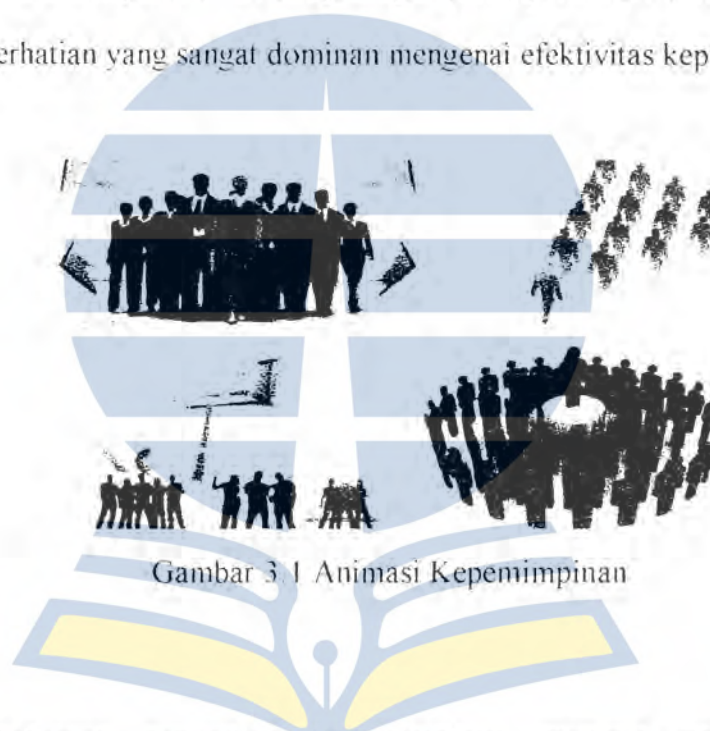
4. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu subjek yang telah lama diminati oleh para ilmuwan maupun untuk orang awam. Istilah tersebut berisi konotasi mengenai citra

individu-individu yang berkuasa dan dinamis yang telah berhasil memimpin armada yang menang perang, yang dapat mengendalikan kerajaan-kerajaan korporasi dari atas gedung-gedung pencakar langit yang sangat berkilauan, atau yang mengarahkan kemana tujuan bangsa-bangsa. Kebanyakan dari uraian kita mengenai sejarah berupa cerita mengenai pemimpin-pemimpin militer, politik, agama dan sosial. Kehebatan-kehebatan yang berasal dari para pemimpin yang berani merupakan inti dari banyaknya legenda serta sebuah mitos. Kekaguman yang meluas mengenai kepemimpinan mungkin karena merupakan sesuatu proses yang demikian misterius dan menyangkut tentang kehidupan semua orang. Mengapa beberapa orang pemimpin tertentu seperti (Gandhi, Nabi Muhammad Saw, Mao Tse-tung) bisa menimbulkan adanya semangat dan dedikasi yang demikian mendalam? Bagaimanakah dengan pemimpin-pemimpin tertentu seperti Julius Caesar, Iskandar Agung, dan Charlemagne yang telah membangun kerajaan-kerajaan yang sedemikian besarnya? Mengapa pemimpin-pemimpin tertentu seperti Indira Gandhi dan Winston Churchill mendadak jatuh dari kekuasaannya, meskipun kelihatannya memiliki kekuasaan serta memiliki catatan prestasi yang sangat baik? Mengapa orang-orang yang tertentu yang kurang dikenali seperti Claudius Caesar dan Adolf Hitler memiliki pengikut-pengikut yang begitu setia sehingga bersedia untuk mengorbankan seluruh hidupnya untuk dirinya tersebut, sedangkan pada beberapa pemimpin lainnya sedemikian begitu dibencinya sehingga para pengikut mereka melakukan untuk berkomplot agar bisa membunuh mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tentang kepemimpinan sudah lama menjadi suatu subjek spekulasi, akan tetapi pada penelitian ilmiah tentang kepemimpinan itu belum

dimulai sebelum di abad kedua puluh. Fokus dari kebanyakan dari penelitian ialah tentang determinan-determinan dari segala efektivitas kepemimpinan. Para ilmuwan perilaku atau behavioral scientist sudah mencoba untuk bisa menemukan beberapa ciri-ciri, perilaku-perilaku, kemampuan-kemampuan, sumber – sumber kekuasaan atau aspek-aspek apa sajakah dari situasi tersebut yang dapat menentukan kelompok. Alasan mengapa orang-orang tersebut timbul sebagai pemimpin dan menjadi determinan dari cara seseorang dalam bertindak merupakan sesuatu pertanyaan yang sangat penting lainnya yang sudah diteliti, namun perhatian yang sangat dominan mengenai efektivitas kepemimpinan.



Gambar 3.1 Animasi Kepemimpinan

Adapun beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli yaitu, Pengertian kepemimpinan menurut **Hemhill dan Coons** adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared goals). Pengertian kepemimpinan menurut **Tannenbaum, Weschler dan Masarik** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah Pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian satu atau

beberapa tujuan tertentu". Pengertian kepemimpinan menurut **Stogdill** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. Pengertian kepemimpinan menurut **Katz dan Kahn** menyatakan bahwa adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada , dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut **Rauch dan Behling** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Pengertian kepemimpinan menurut **Jacobs dan Jacques** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti atau pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Pengertian kepemimpinan menurut Hosking adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya. Pengertian kepemimpinan menurut **S.P. Siagian** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu keterampilan dan kemampuan dari seseorang yang telah menduduki jabatan menjadi pimpinan dalam sebuah pekerjaan dalam mempengaruhi tindakan orang lain, terutama kepada bawahannya agar berfikir dan bertindak laku sedemikian rupa sehingga melalui tingkah laku positif ini dapat memberikan sumbangan yang nyata didalam pencapaian tujuan organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut **Prof. Kimbal Young** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu bentuk dominasi yang disengaja atau disadari oleh kemampuan pribadi yang mampu mendorong atau mengajak kepada orang lain dalam melakukan sesuatu berdasarkan atas penerimaan oleh kelompoknya dan

mempunyai keahlian yang khusus secara tepat bagi situasi yang khusus. Pengertian kepemimpinan menurut **Ordway Tead** dalam bukunya *The Art Of Leadership* yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam mempengaruhi orang-orang agar mereka ingin bekerja sama dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Pengertian kepemimpinan menurut **George R. Terry** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka menyukai untuk berusaha dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok atau organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut **Howard H. Hoyt** menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk bisa mempengaruhi segala tingkahlaku dari manusia, dan memiliki kemampuan dalam membimbing seseorang.

Itulah tadi beberapa pengertian kepemimpinan menurut pandangan para ahli. Kebanyakan pengertian kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja untuk dijalankan oleh seseorang terhadap organisasi atau kelompok. Berbagai pengertian kepemimpinan yang sudah ditawarkan tapi kelihatannya tidak berisi hal-hal selain itu. Pengertian tersebut berbeda dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya siapa yang menggunakan pengaruh, sasaran yang ingin diperoleh dari pengaruh tersebut, cara bagaimana pengaruh tersebut digunakan, serta hasil dari usaha menggunakan pengaruh tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan hanya merupakan sebuah hal akademis yang dicari-cari. Ia mencerminkan adanya ketidaksesuaian yang mendalam mengenai identifikasi dari para pemimpin serta proses kepemimpinan. Perbedaan-perbedaan didalam

pemilihan fenomena untuk melakukan penyelidikan dan kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan hasilnya

Teori kepemimpinan yaitu teori genetis dimana menjelaskan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan untuk bisa menjadi pemimpin; dia telah memiliki bakat dan mempunyai pembawaan untuk bisa menjadi pemimpin. Menurut teori kepemimpinan seperti teori genetis ini mengasumsikan bahwa tidak setiap orang dapat menjadi pemimpin, hanya beberapa orang yang memiliki pembawaan dan bakat saja yang dapat menjadi pemimpin. Hal tersebut memunculkan "Pemimpin tidak hanya sekedar dibentuk tapi dilahirkan"

Teori kepemimpinan yang kedua yaitu teori sosial yang menyatakan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena lingkungannya yang mendukung, keadaan dan waktu memungkinkan ia bisa menjadi pemimpin. Setiap orang dapat memimpin asal diberikan kesempatan dan diberikan pembinaan untuk dapat menjadi pemimpin meskipun ia tidak memiliki pembawaan atau bakat. Adapun istilah dari teori kepemimpinan sosial ini yaitu Pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan.

Teori kepemimpinan yang ketiga yaitu teori ekologis, dalam teori kepemimpinan ekologis ini menyatakan bahwa gabungan dari teori genetis dan sosial, dimana seseorang akan menjadi pemimpin membutuhkan bakat dan bakat tersebut mesti selalu dibina agar berkembang. Kemungkinan untuk bisa mengembangkan bakat tersebut itu tergantung dari lingkungannya.

Teori kepemimpinan yang keempat yaitu teori situasi, dalam teori kepemimpinan situasi ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin ketika berada

dalam situasi tertentu karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Akan tetapi pada situasi yang lainnya, kelebihan tersebut tidak dibutuhkan, akhirnya ia tidak akan menjadi pemimpin lagi, bahkan bisa jadi menjadi pengikut saja.

Oleh karena itu, jika seorang ingin menjadi pemimpin dan ingin meningkatkan kecakapannya dan kemampuannya dalam memimpin maka dibutuhkan untuk bisa mengetahui segala ruang lingkup gaya kepemimpinan yang efektif. Adapun para ahli dalam bidang kepemimpinan sudah meneliti dan mengembangkan beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda dimana sesuai dengan adanya evolusi dari teori kepemimpinan. Untuk ruang lingkungannya, gaya kepemimpinan terbagi atas tiga pendekatan yaitu pendekatan sifat kepribadian pemimpin, dan pendekatan perilaku pemimpin dan pendekatan situasional atau kontingensi.

Selain itu, para pemimpin juga memiliki gaya (style) dalam kepemimpinan mereka. Pemimpin itu memiliki sifat, kebiasaan dan watak serta kepribadian yang khas. Dari tingkah laku dan gayanya lah yang dapat membedakan dirinya dibanding orang lain. Gaya tentunya akan selalu dapat mewarnai perilaku dan tipe seseorang dalam memimpin atau gaya kepemimpinan.

Adapun gaya-gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

a. Gaya kepemimpinan otokratis

Gaya ini terkadang disebut sebagai kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya otokratis ini ditandai dengan adanya petunjuk yang sangat banyak sekali yang berasal dari pemimpin dan tidak ada satupun peran para anak buah dalam merencanakan dan sekaligus mengambil suatu keputusan. Gaya kepemimpinan otokratis ini akan menentukan sendiri

keputusan, peran, bagaimana, kapan dan bilamana secara sepihak. Yang pasti tugas yang diperintahkan mesti dilaksanakan. Paling sangat menonjol dalam gaya kepemimpinan otokratis ini adalah seseorang akan memberikan perintah dan mesti dipatuhi. Ia akan memerintah berdasarkan dari kemampuannya untuk menjatuhkan hukuman serta memberikan hadiah. Gaya kepemimpinan otokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain yang ada disekitar agar mau bersedia berkerjasama dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan ditempuh atas segala cara kegiatan yang akan dijalankan atas dasar putusan dari pemimpin.

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratis ini yaitu wewenang mutlak itu terpusat dari pemimpin, keputusan akan selalu dibuat oleh pemimpin, kebijakan akan selalu dibuat oleh pemimpin, komunikasi hanya berlangsung dalam satu arah dimana dari pimpinan ke bawahan bukan sebaliknya, pengawasan terhadap (sikap, perbuatan, tingkah laku atau kegiatan) dari para bawahannya dilakukan dengan ketat, tak ada kesempatan untuk para bawahan dalam memberikan (pendapat, saran atau pertimbangan), lebih banyak mendapatkan kritikan dibanding pujian, menuntut adanya kesetiaan dan prestasi yang sempurna dari para bawahan tanpa adanya syarat, dan cenderung memberikan paksaan, hukuman dan ancaman.

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan

yang dapat dilakukan dimana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan

Gaya tersebut terkadang disebut sebagai gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah, kepemimpinan dengan adanya kesederajatan, kepemimpinan partisipatif atau konsultatif. Pemimpin yang berkonsultasi kepada anak buahnya dalam merumuskan suatu tindakan putusan bersama. Adapun ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis ini yaitu memiliki wewenang pemimpin yang tidak mutlak, pimpinan bersedia dalam melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, kebijakan dan keputusan itu dibuat bersama antara bawahan dan pimpinan, komunikasi dapat berlangsung dua arah dimana pimpinan ke bawahan dan begitupun sebaliknya, pengawasan terhadap (sikap, perbuatan, tingkah laku atau kegiatan) kepada bawahan dilakukan dengan wajar, prakarsa bisa datang dari bawahan atau pimpinan, bawahan memiliki banyak kesempatan dalam menyampaikan saran atau pendapat dan tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan bersifat permintaan dengan mengenyampingkan sifat instruksi, dan pimpinan akan memperhatikan dalam bertindak dan bersikap untuk memunculkan saling percaya dan saling menghormati.

c. Gaya kepemimpinan delegatif

Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri khas dari perilaku pemimpin didalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin.

Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi adanya karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan, agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tak bisa dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai macam sebab. Gaya kepemimpinan delegatif ini sangat cocok dilakukan kalau staff yang dimiliki ternyata mempunyai motivasi dan kemampuan yang tinggi. Dengan demikian pimpinan tak terlalu banyak dalam memberikan perintah kepada bawahannya, bahkan pemimpin akan lebih banyak dalam memberikan dukungan untuk bawahannya.

d. Gaya kepemimpinan birokratis.

Gaya kepemimpinan birokratis ini dilukiskan dengan pernyataan “Memimpin berdasarkan adanya peraturan”. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis, secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Segala kegiatan mesti terpusat pada pemimpin dan sedikit saja diberikan kebebasan kepada orang lain dalam berkreasi dan bertindak, itupun tak boleh melepaskan diri dari ketentuan yang sudah berlaku. Adapun beberapa ciri gaya kepemimpinan birokratis ialah Pimpinan akan menentukan segala keputusan yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan dan akan memerintahkan semua bawahan untuk bisa melaksanakannya. Pemimpin akan menentukan semua standar tentang bagaimana bawahan akan melakukan tugas. Adanya sanksi yang sangat jelas kalau seorang bawahan

tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditentukan.

e. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire

Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi.

Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali dalam menggunakan kekuasaannya atau sama sekali telah membiarkan anak buahnya untuk berbuat dalam sesuka hatinya. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan Laissez Faire adalah Bawahan akan diberikan kelonggaran atau fleksibilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi dengan hati-hati diberikan batasan serta berbagai macam prosedur. Bawahan yang sudah berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya akan diberikan hadiah atau penghargaan, di samping adanya suatu sanksi-sanksi bagi mereka yang kurang berhasil, sebagai dorongan. Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam suasana yang sangat baik secara umum manajer akan bertindak cukup baik; Manajer akan menyampaikan berbagai macam peraturan yang berhubungan dengan tugas-tugas atau perintah, dan sebaliknya para bawahan akan diberikan kebebasan dalam memberikan pendapatannya.

f. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian

Gaya kepemimpinan ini adalah gaya pemimpin dengan cara memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan

secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh si pemimpin yang bergaya otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Tipe kepemimpinan yang otoriter biasanya mengarah kepada tugas. Artinya dengan adanya tugas yang telah diberikan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi, maka kebijaksanaan dari lembaganya ini mesti diproyeksikan dalam bagaimana ia dalam memerintah kepada bawahannya agar mendapatkan kebijaksanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Di sini bawahan hanyalah menjadi suatu mesin yang hanya sekedar digerakkan sesuai dengan kehendaknya sendiri, inisiatif yang datang dari bawahan sama sekali tidak pernah sekalipun diperhatikan.

g. Gaya Kepemimpinan Karismatis

Gaya kepemimpinan Karismatik memiliki kelebihan yaitu mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Mungkin, kelemahan terbesar dari tipe kepemimpinan model ini dapat di analogikan dengan peribahasa Tong Kosong yang Nyaring Bunyinya. Mereka hanya mampu menarik orang untuk bisa datang kepada mereka. Setelah beberapa lama kemudian, orang - orang yang datang tersebut akan kecewa karena adanya ketidak-konsisten-an. Apa yang telah diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta dalam pertanggungjawabannya, si pemimpin akan senantiasa memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji.

h. Gaya Kepemimpinan Diplomatis

Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya, melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Hanya pemimpin dengan menggunakan kepribadian putih ini yang hanya bisa melihat kedua sisi, dengan jelas! Apa yang dapat menguntungkan dirinya, dan juga dapat menguntungkan lawannya. Kesabaran dan kepasifan merupakan kelemahan pemimpin dengan menggunakan gaya diplomatis ini. Umumnya, mereka sangat begitu sabar dan sanggup dalam menerima tekanan. Namun kesabarannya ini dapat sangat keterlaluhan. Mereka dapat menerima perlakuan yang takmenyengangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak menerimanya. Dan seringkali hal inilah yang membuat para pengikutnya akan meninggalkan si pemimpin.

i. Gaya Kepemimpinan Moral

Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis seperti ini ialah pada umumnya Mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebajikan-kebajikan ada dalam diri pemimpin tersebut. Orang – orang akan datang karena kehangatannya terlepas dari semua kekurangannya. Kelemahan dari kepemimpinan seperti ini ialah emosinya. Rata-rata orang seperti ini sangatlah tidak stabil, terkadang dapat tampak sedih dan sangat mengerikan, kadang pula bisa saja sangat begitu menyenangkan dan bersahabat.

j. Gaya Kepemimpinan Administratif

Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan telalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko dan mereka cenderung akan mencari aman.

k. Gaya kepemimpinan analitis (Analytical).

Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Gaya ini akan berorientasi pada hasil dan akan lebih menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. Kepemimpinan model ini sangatlah mengutamakan logika dengan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang masuk akal serta kuantitatif.

l. Gaya kepemimpinan asertif (Assertive).

Gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Pemimpin tipe asertif lebih terbuka didalam konflik dan kritik. Setiap Pengambilan keputusan muncul dari suatu proses argumentasi dengan adanya beberapa sudut pandang sehingga muncullah kesimpulan yang memuaskan.

m. Gaya kepemimpinan entrepreneur.

Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama.

Gaya kepemimpinan model ini biasanya akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi.

n. Gaya Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan visioner, merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Kepemimpinan Visioner akan memerlukan kompetensi tertentu. Pemimpin visioner setidaknya mesti mempunyai empat kompetensi kunci sebagaimana dikemukakan oleh Burt Nanus (1992), yaitu 1. Seorang pemimpin visioner mesti mempunyai kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk menghasilkan "guidance, encouragement, and motivation." 2. Seorang pemimpin visioner mesti dapat memahami lingkungan luar dan dapat memiliki kemampuan dalam bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang yang datang. Ini termasuk, yang paling penting, dapat "relate skillfully" dengan orang-orang kunci yang ada di luar organisasi, namun memainkan peran yang sangat penting terhadap organisasi (investor, dan pelanggan). 3. Seorang pemimpin mesti bisa memegang peran penting didalam membentuk dan dapat mempengaruhi segala praktek organisasi, prosedur, produk dan jasa. Seorang pemimpin dalam hal ini mesti dapat terlibat di dalam organisasi untuk bisa menghasilkan dan dapat mempertahankan kesempurnaan pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke masa depan (successfully achieved vision).

4 Seorang pemimpin visioner mesti bisa mempunyai atau mengembangkan “ceruk” untuk bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Ceruk ini merupakan sebuah suatu bentuk imajinatif, yang mengacu atas kemampuan data untuk dapat mengakses segala kebutuhan masa depan konsumen, teknologi, dan lain sebagainya. Ini termasuk kemampuan dalam mengatur sumber daya organisasi guna dapat mempersiapkan diri menghadapi adanya kemunculan kebutuhan dan perubahan ini.

Dalam era turbulensi lingkungan seperti saat ini, setiap pemimpin mesti siap dan dituntut mampu dalam melakukan suatu transformasi terlepas dari gaya kepemimpinan apa yang mereka anut. Pemimpin mesti mampu dalam mengelola perubahan, termasuk di dalamnya dapat mengubah budaya organisasi yang tak lagi kondusif dan produktif. Pemimpin mesti memiliki visi yang tajam, pandai mengelola keragaman dan dapat mendorong terus suatu proses pembelajaran karena adanya dinamika suatu perubahan lingkungan serta adanya persaingan yang semakin ketat.

o. Gaya Kepemimpinan Situasional

kepemimpinan situasional ialah “a leadership contingency theory that focuses on followers readiness/maturity” Inti dari teori kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda, tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Pemahaman fundamen dari teori kepemimpinan situasional ialah mengenai tidak adanya gaya kepemimpinan yang paling terbaik. Kepemimpinan yang efektif ialah bergantung dari relevansi tugas, dan hampir semua pemimpin yang sukses selalu dapat mengadaptasi gaya kepemimpinan yang sangat tepat.

Efektivitas kepemimpinan bukan hanya pada soal pengaruh terhadap individu dan kelompok akan tetapi bergantung juga terhadap tugas, pekerjaan atau fungsi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Jadi pendekatan pada kepemimpinan situasional itu mesti fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik.

Dari cara pandang ini, seorang pemimpin agar efektif ia mesti mampu dalam menyesuaikan gayanya terhadap tuntutan situasi yang selalu berubah-ubah. Teori kepemimpinan situasional akan bertumpu pada dua konsep yang fundamental yaitu tingkat kesiapan/kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut dan gaya kepemimpinan.

p. Kepemimpinan Militeristik

Tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik yaitu: (1) lebih banyak dalam menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat begitu otoriter, kaku dan seringkali untuk kurang bijaksana, (2) menghendaki adanya kepatuhan yang mutlak dari bawahan, (3) sangat menyenangi suatu formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang terlalu berlebihan, (4) menuntut adanya sebuah disiplin yang keras dan kaku dari para bawahannya, (5) tidak menghendaki adanya saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya, (6) komunikasi hanya dapat berlangsung searah.

Menurut Sondang P. Siagian (1989 : 35) kepemimpinan /manajemen adalah keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya dengan menggerakkan orang lain didalam organisasi. Sedangkan menurut Malayu (1990 : 5) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan kedua pendapat tas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Agar proses kepemimpinan/manajemen dapat berlangsung diperlukan sarana tertentu, dan sarana dimaksud itu dikenal dengan unsure manajemen yaitu manusia, uang, Mesin material dan metode. Kemudian agar manajemen kepala kampung dapat berjalan dengan baik diperlukan rangkaian kegiatan yang sering disebut fungsi manajemen.

Fungsi manajemen menurut *Sondang P. Siagian* ialah sebagai berikut

- a. Perencanaan (*planning*);
- b. Pengorganisasian (*organizing*);
- c. Pemberi motivasi (*monvating*);
- d. Pengawasan (*controlling*);
- e. Penilaian (*evaluating*).

Fungsi manajemen diatas sangat berkaitan erat dimana salah satu fungsi tidak dapat berjalan sendiri tanpa fungsi lain.

Selanjutnya menurut *M. H. Matondang (2008)* memberikan definisi bahwa Pemimpin adalah seseorang yang maampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan kepemimpinan adalah sesuatu proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kepemimpinan

adalah (leadership) adalah hubungan interaksi antara pengikut (follower) dan pemimpin dalam mencapai tujuan.

Dengan gaya kepemimpinan yang merupakan pola sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam pelaksanaan proses mempengaruhi orang lain. Dan menurut *Irfham Fahmi* Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain. Dan untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa pendapat para ahli, yaitu :

- a. Stephen P. Robbins mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kerah tercapainya tujuan.
- b. Richard L. Draf mengatakan, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan mempengaruhi orang kepada pencapaian tujuan.
- c. Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mempunyai mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan, pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.

Pemimpin dan kepemimpinan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, dalam artian bisa dikaji secara terpisah, namun harus dilihat sebagai satu kesatuan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki dari seorang pemimpin tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian ada sebagian orang memiliki sifat kepemimpinan namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut.

Dalam mengembangkan dengan memajukan suatu organisasi manajer dengan pengaruh kepemimpinan yang dimilikinya berkewajiban memahami perilaku setiap karyawan yang berada dilingkungan kerjanya. Karena itu dalam mewujudkan suatu perilaku yang diinginkan oleh konsep manajemen maka seorang manajer mengharuskan untuk mempergunakan kekuatannya. Kekuatan legitimasi, penghargaan, dan koersif adalah bentuk kekuatan jabatan yang digunakan manajer untuk mengubah perilaku karyawan (Ricard L. Daft : 2002)

Pengertian kepemimpinan menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

Menurut Hemhill dan Coons, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu

Menurut Veithzal Rivai (2004) bahwa kepemimpinan kadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela/suka cita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang karena ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan. Secara langsung strategi merupakan bagian dari sebuah proses manajemen yang sangat erat kaitannya dengan kerja seorang pemimpin. Proses pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek dilakukan oleh Tim Pengelolah kegiatan yang mana disana ada tanggung jawab yang diselesaikan dalam kapasitas sebagai pemimpin yaitu Ketua Tim Pengelolah Kegiatan Kampung (TPKK) PNPM Mandiri Prospek dan Kepala Kampung yang merupakan penanggung jawab langsung terhadap program tersebut. Peran dari Kepala kampung dan Ketua TPKK ini sangat diperlukan dalam mengawal program dengan sejumlah pembiayaan yang ada untuk mencapai keberhasilan, dengan demikian maka membutuhkan sebuah manajemen strategi dari kedua figur pemimpin ini.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Sekilas, makna pemberdayaan memiliki makna luas dari beberapa sudut pandang. Agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Berikut ini definisi pemberdayaan menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment," yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.
- b. Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.
- c. Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok

masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat.

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Ditinjau dari lingkup dan objek pemberdayaan mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Peningkatan kepemilikan aset (Sumber daya fisik dan finansial) serta kemampuan secara individual maupun kelompok untuk memanfaatkan aset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka.
- b. Hubungan antar individu dan kelompok, kaitannya dengan pemilikan aset dan kemampuan memanfaatkannya.
- c. Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan.
- d. Pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja, baik di tingkat lokal, regional maupun global.

Sedangkan dalam proses pemberdayaan, menurut Pranarka Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa "proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan

Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

- Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan);
- Mampu mengarahkan dirinya sendiri;
- Memiliki kekuatan untuk berunding;
- Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan;
- Bertanggungjawab atas tindakannya.

Proses pemberdayaan masyarakat adat akan menyisakan berbagai tantangan yang multidimensional. Peran kebijakan pemerintah tentulah diperlukan untuk mempercepat komunitas ini lebih mandiri dan siap menyongsong perubahan sosial yang semakin memperkuat modal sosial.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan

menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Aksesibilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh masyarakat.
- 2) Partisipasi atau keterlibatan, Menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan Proses pembangunan
- 3) Akuntabilitas, Pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat.
- 4) Kapasitas organisasi local, Kemampuan berkerja sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kesatuan proses yang berkelanjutan melalui kegiatan “kaji tindak yang partisipatif” atau dikenal sebagai *Participatory Action Research/ PAR*. Pengertian PAR bukanlah sebuah ‘proyek’ yang melibatkan partisipasi masyarakat, melainkan lebih bernuansa filosofis untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri dan bagi kepentingan peningkatan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan potensi yang mereka miliki sendiri, melalui kegiatan aksi dan refleksi yang berkelanjutan.

Di dalam pelaksanaannya, PAR dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengumpulan data dasar, dilaksanakan dengan menggabungkan teknik penilaian desa secara cepat (*Rapid Rural Appraisal/ RRA*) yang

dilakukan oleh orang luar dan survai mandiri yang dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui *Community Self Survei/ CSS*.

- 2) Kegiatan perencanaan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan penilaian partisipatif atau *Participatory Rural Appraisal/ PRA*.
- 3) Kegiatan aksi merupakan 'proses belajar' yang terus menerus dan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan (in door dan out door) yang kait mengait secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa yang partisipatif (*Participatory Training Method*)
- 4) Refleksi dilakukan juga oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kegiatan melalui *Participatory Assesment for Monitoring and Evaluation*.

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelolah, menurut Amran Y.S. Chaniago (1995:300) kelolah adalah sesuatu yang diurus, mengurus suatu bidang usaha perusahaan, pertanian dan sesuatu yang mempunyai tujuan), untuk mencapai sasaran dari pemberian bantuan dana dimaksud yaitu dana pemberdayaan perlu adanya pengelolaan yang baik, sebab pemberian dana tersebut mempunyai tujuan memberikan sebuah proses perubahan bagi kehidupan ekonomi masyarakat di kampung sambrawai guna terwujud sebuah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kesejahteraan masyarakat (*Society Welfare*) merupakan tujuan utama dari setiap program pembangunan yang sementara dilaksanakan. Kesejahteraan atau sejahtera memiliki empat arti, dala istilah umum sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, sebuah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, sejahtera memiliki arti khusus resmi atau

teknikal (bahan baca ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan social menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan financial, tetapi tidak dapat bekerja atau yang keadaan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidak mampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegah untuk bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pemberian bantuan dana tersebut, dan bagaimana pengelolaannya yang efisien dan efektif yang dilakukan oleh kepala kampung bersama tim pengelolah kegiatan kampung yang telah dibentuk dan dipercayakan untuk mengurus dana tersebut. Dana merupakan sejumlah uang yang dikemaskan dan diberikan untuk membiayai kegiatan tertentu, demikian dana bantuan pemberdayaan kampung diberikan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat sambrawai.

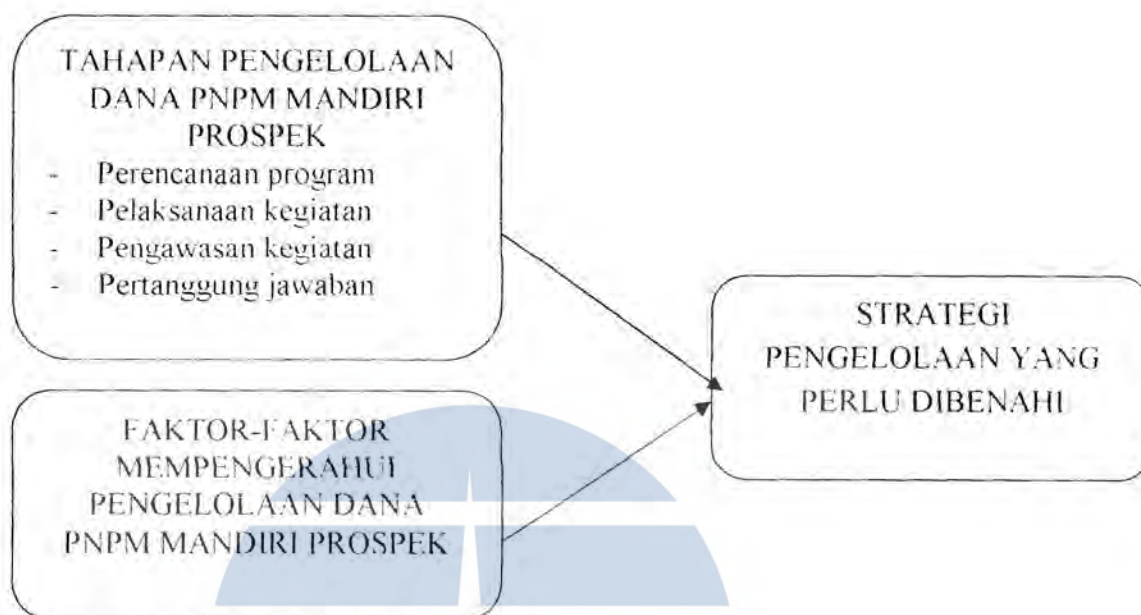
Pemberdayaan berasal dari kata daya, kata daya menurut Amran Y.S Chaniago (1995:144) daya adalah tenaga atau kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan, tenaga yang menyebabkan timbulnya gerak, usaha, ikhtiar. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah upaya dengan segenap tenaga untuk melakukan sebuah perubahan dengan segenap potensi yang ada

menjadi sesuatu kekuatan nyata dengan memperjuangkan nilai-nilai aspek kehidupan yang lebih baik. Menurut Pheni Chalid (2012) bahwa Pemberdayaan merupakan sebuah proses melegitimasi dan memperkuat segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, mulai dari gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat yang ada. Masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan dan potensi yang ada namun terkadang tidak dapat mereka kembangkan dengan baik secara mandiri, tapi membutuhkan partisipasi pemerintah.

Sumberdaya manusia juga merupakan faktor penting, sesuatu perencanaan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif akan tergantung juga karena kualitas seorang manusia (kepala kampung). Menurut Jusuf Suit Almasdi (1995: 94) Pengertian efisiensi ditinjau dari sudut kualitas sumberdaya manusia adalah bagaimana sikap penghematan pemakaian bahan dan waktu serta biayayang dilakukan oleh masing-masing personel dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk itu upaya dalam melakukan pembinaan sangat diperlukan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Apabila pembinaan berhasil, dapat diyakini mereka akan menjadi manusia-manusia yang produktif, karena mamiliki mentalitas yang cukup siap melaluisebuah proses pembinaan. Suharto dalam bukunya Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat, Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan soial dan Pekerjaan Sosial (2009:57) menjelaskan konsep pemberdayaan adalah pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan), ide utama pemberdayaan adalah konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemaampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan

dan minat mereka. Selanjutnya masih Suharto (2009:59-61), menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai berikut : “Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. *Sebagai proses*, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. *Sebagai tujuan*, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya.” Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Prospek harus didasari dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Undang-undang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua nomor 21/2001 secara substantif memberikan keberpihakan kepada rakyat untuk dapat memberdayakan kemandiriannya dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus tersebut. daerah diberikan sejumlah anggaran otonomi khusus yang diperuntukan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, usaha-usaha di kampung yang dilakukan oleh masyarakat, baik berbentuk perorangan atau kelompok dengan tujuan memberikan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kampung tersebut.

Kerangka berpikir



a. Mekanisme Pengelolaan dana

Dana batuan ini dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan kampung atau yang selalu disebut TPKK, profesionalisme dari tim ini sangat menentukan bagaimana mereka memahami dan mengelola dana tersebut mulai dari membuat usulan program, menerima dana mempergunakan sampai mempertanggung jawabkan. Usulan program yang dibuat harus disusun bersama kepala kampung, melalui sebuah musyawarah dengan masyarakat, kemudian usulan program itu perlu dilakukan penilaian perengkingan, sudah tentu pada tahapan ini sumberdaya manusia sangat memegang peran penting.

Kepala kampung yang memiliki sumberdaya pengetahuan yang cukup, melalui sebuah proses yang matang maka dengan sendirinya akan mampu memainkan perannya, agar dapat menterjemahkan setiap kebutuhan

mendesak yang perlu dikedepankan untuk dibiayai melalui dana pemberdayaan melalui tahap usulan perencanaan program PNPM Mandiri Prospek.

Demikian juga dalam proses pengelolaan, Tim pengelolah kegiatan perlu untuk selalu didampingi dan diawasi oleh seorang kepala kampung, sekalipun ada tim pendamping tingkat distrik



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe atau Metode Penelitian

Tipe atau metode penelitian untuk kajian ilmu-ilmu sosial lebih banyak menggunakan metode penelitian kualitatif, namun juga dapat digabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Tergantung pada bagian-bagian mana yang diperlukan disesuaikan dengan data dan informasi variabel, indikator dan lokasi penelitian yang hendak diambil.

2 (dua) alasan yang melatarbelakangi perlunya melakukan pemilihan penelitian kualitatif, yaitu karena sifat masalah dari penelitian tersebut dan yang kedua adalah mengangkat dan memahami suatu fenomena. Sedangkan pendekatan untuk mempertegas atau memperjelas penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yang terjadi dalam pelaksanaan tugas kemampuan kepala kampung dalam memainkan peran sebagai pimpinan. Pendekatan studi kasus ini sendiri menurut Faizal (1999), adalah penelitian dengan penelaahan secara intensif, mendetail, dan komprehensif terhadap suatu permasalahan.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian penulis adalah ingin mengamati dan meneliti sejauh mana strategi yang sementara dipakai dalam proses pengelolaan program PNPM Mandiri Prospek oleh kepala kampung dan Tim Pengelolah kegiatan dalam hal ini TPKK kampung Pasir Putih mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan, sehingga program tersebut apakah sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dengan baik atau belum kemudian faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan program Pemberdayaan PNPM Mandiri prospek.

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Nasution, 1999), bahwa adalah menentukan fokus penelitian pada awalnya masalah yang akan diteliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah peneliti berada pada lokus penelitian. Fokus ini masih mungkin mengalami perubahan setelah penulis turun lapangan, dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka peneliti akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian sehingga menghindari agar peneliti tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas atau kurang relevan terhadap pengelolaan dana Pemberdayaan kampung. Proses ini meliputi

1. Penyelidikan: apakah kepala kampung sudah melakukan pembinaan kepada tim pengelola kegiatan kampung, apakah kepala kampung sudah melakukan pengawasan, dan apakah kepala kampung sudah menggerakkan partisipasi masyarakat ?
2. Perumusan masalah, apa yang menjadi factor penghambat program PNPM Mandiri Prospek ini dalam pelaksanaan kegiatan di kampung Pasir Putih mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan ?
3. Identifikasi Daya Dukung, Faktor-faktor apa saja, atau strategi apa saja yang perlu dilakukan oleh kepala kampung sebagai pimpinan di wilayah kampung

itu dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana pem berdayaan kampung bersama Tim Pengelolah kegiatan ?

4. Perumusan Tujuan; apakah penggunaan dana tersebut benar-benar sudah mencapai sasaran dari pemberian dana bantuan tersebut.
5. Perlu adanya pengawasan dari instansi tehknis dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung kabupaten Kepulauan Yapen, secara berkala agar dapat mengetahui dengan pasti pengelolaan dana di tingkat kampung

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terfokus di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (1992), instrument penelitian tidak bersifat eksternal atau obyektif akan tetapi internal. Subyektif yaitu peneliti sendiri tanpa menggunakan tes, angket atau eksperimen dengan sendirinya tidak menggunakan definisi operasional. Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth-interview), sedangkan untuk memandu wawancara, peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. Panduan ini mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara. Namun dengan demikian hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara tersebut semakin berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti bola salju

(*snowball*). Alat bantu yang digunakan dalam wawancara ini adalah tape recorder dan catatan-catatan.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini sumber data yang digunakan antara lain :

1. Sumber data primer, sumber data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah-masalah yang dibahas. Data ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi.
2. Sumber data sekunder, sumber data yang digunakan atau diperoleh secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh dari buku laporan, dokumen-dokumen, brosur, monografi, dan buku-buku literatur.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Sedangkan responden menurut Rusidi (1993), adalah sejumlah orang yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri, sedangkan informan adalah sejumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui tentang proses pengeloaan dana yaitu masyarakat di kampung sambrawai yang jelas harus menikmati pemberian bantuan dimaksud. Informan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang benar-

benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian.

Dengan melihat karakter informan tersebut, maka dalam penelitian ini belum dapat diketahui jumlah informan yang dibutuhkan karena tergantung pada perkembangan dilapangan. Namun pada awal penelitian telah ditetapkan beberapa informan yang menurut peneliti bahwa orang-orang tersebut dapat memberikan informasi dan pandangan tentang masalah proses penyelenggaraan program-program pembangunan yang dibiayai melalui dana pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek tahun anggaran 2014 ada keberhasilan atau tidak, dan bagaimana keterlibatan aktif kepala dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan dari program ini.

Dalam penelitian ini informan penelitian yang diambil adalah masyarakat di kampung sambrawai yang dianggap bisa dijadikan sumber informasi seperti

- Kepala Kampung 1 orang
- Tim Pengelola Kegiatan Kampung 3 orang
- PJOK Distrik Yapen Selatan 1 orang
- Pendamping Program Tingkat Distrik 1 orang
- Salah Satu anggota Pelaku Program tingkat kabupaten
- Tokoh agama 1 orang
- Tokoh Pemuda 1 orang
- Tokoh adat 1 orang
- Tokoh Perempuan 1 orang
- Tokoh Pemerintahan 1 orang

- Anggota Bamuskam 5 orang
- Para Aparat kampung 4 orang

G Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi :

1. Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terhadap masalah penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrasian dan transformasi data “kasar” yang muncul di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa, hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat sajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yang memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan hal ini dilakukan sejak mulai pengumpulan data, dengan penanganan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan diverifikasi adalah yang berupa suatu penggolongan sebagai pikiran kedua yang timbul

melintas peneliti pada waktu menulis, verifikasi yang dapat dilakukan dengan jauh lebih teliti seperti berdiskusi atau saling memeriksa teman.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Pada penelitian yang studi kasus lazimnya dituntut wawancara mendalam (*indepth interviewing*), dituntut banyak pelacakan (*probing*) guna mendapatkan data yang lebih dalam, utuh dan rinci, karenanya "pedoman wawancara" pada studi kasus hanya memuat "pertanyaan pertanyaan pokok" yang umumnya berbentuk pertanyaan terbuka atau tidak berstruktur, adalah tugas pewawancara untuk melacak serta lebih jauh mendalam, lengkap dan rinci. Disini kemampuan, kecerdikan dan kejelian pewawancara untuk melacak menjadi prasyarat utama karenanya, wawancara dalam studi kasus umumnya dilakukan peneliti itu sendiri (Faizal : 1999)

2. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi dan proses atau perilaku (Faizal : 1999). Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Prof. Heru Nugroho (2001), observasi adalah studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, terarah dan terencana pada

tujuan tertentu dengan mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok orang dengan mengacu pada syarat-syarat dan aturan penelitian ilmiah. Dalam suatu karya tulis ilmiah, penjelasan yang diutarakan harus tepat, akurat, dan teliti, tidak boleh dibuat-buat sesuai keinginan hati penulis. Menurut Patton (1987):

“Notes that quotations “reveal the respondents' levels of emotion, the way in which they have organized the world, their thoughts about what is happening, their experiences, and their basic perceptions. The task for the qualitative evaluator is to provide a framework within which people can respond in a way that represents accurately and thoroughly their point of view about the program.”

tujuan dilakukannya observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas. Namun pada dasarnya, observasi dilakukan untuk mengamati hal-hal yang kurang disadari oleh orang lain. Observasi merupakan metode yang paling mudah dalam pengumpulan data dan informasi bila dibandingkan dengan metode yang lain.

Seorang pengamat atau observer harus memiliki pengetahuan yang cukup atas objek observasi, memahami tujuan-tujuan dilaksanakannya suatu penelitian, melakukan pengamatan secara kritis dan cermat, mencatat setiap gejala yang terjadi selama proses observasi, serta harus memiliki pengetahuan terhadap alat-alat ilmiah yang digunakan selama observasi. Hal-hal yang sering menjadi objek observasi adalah

- Pelaku. Pelaku adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Mencakup apa status mereka, siapa saja mereka, kegiatan apa yang mereka lakukan, dan sebagainya
- Tujuan merupakan apa yang diharapkan partisipan terhadap pelaksanaan pengamatan.
- Perasaan partisipan yang ditunjukkan dalam mimik wajah, gerak tubuh dan ucapan.
- Ruang dan waktu menyangkut pandangan partisipan terhadap tempat dan waktu suatu kegiatan.
- Benda yang diamati adalah jenis, bahan, kegunaan, sifat, dan bentuknya
- Peristiwa, mencakup apa saja yang terjadi seiring dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

3 Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari catatan-catatan publik tentang hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa buku, kertas dan tabel

II Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong : 1999). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis data interaktif

(*interaktif model of analysis*) dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

1 Validitas Data

Validitas dalam penelitian kualitatif merupakan faktor penting adalah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data adalah model yang dikembangkan oleh Patton (1987) Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik tringulasi yang umum digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (dalam Moleong : 1999). Menurut Patton (dalam Moleong 1999:178) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, apakah hasil wawancara memberi kekuatan dan validitas terhadap pengamatan (observasi).
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi , membandingkan data-data perorangan dengan memberikan asumsi terhadap data-data secara umum.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang tertentu
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang tentang berbagai pendapatan dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan rendah, orang berada, orang pemerintahan dan lain-lain
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

6. Dalam hal ini jangan banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut.



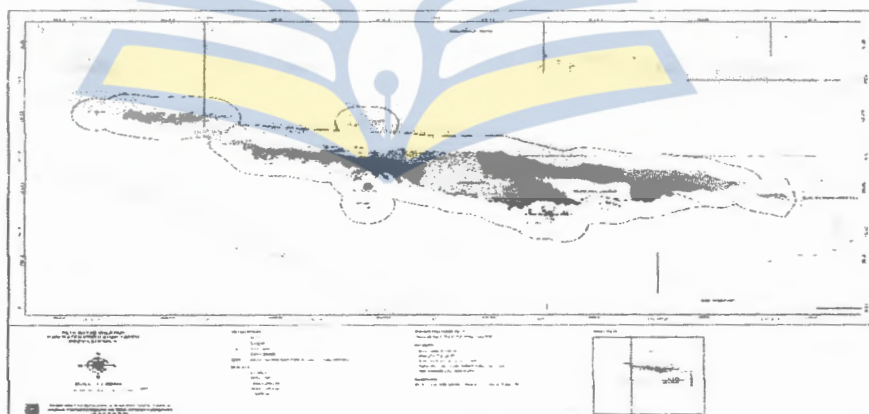
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Tugas Akhir Program Magister ini adalah di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Secara geografis letak Kabupaten Kepulauan Yapen berada pada $134^{\circ}56'21,708''$ dan $137^{\circ}4,2'20,592''$ Bujur Timur serta $-2^{\circ}2,4'8,424''$ dan $-1^{\circ}23,4'19,548''$ Lintang Selatan. Kabupaten Kepulauan Yapen berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor di sebelah utara, Kabupaten Waropen di sebelah selatan, Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah timur dan Kabupaten Manokwari di sebelah barat.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kepulauan Yapen

2. Distrik Yapen Selatan

Secara umum, Distrik Yapen Selatan terdiri dari 10 kampung dan 4 kelurahan. Jika dibandingkan dengan distrik lainnya se-Kabupaten Kepulauan Yapen, jumlah kelurahan di distrik ini lebih banyak. Hal ini dikarenakan Distrik Yapen Selatan merupakan distrik yang berada dalam kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Wilayah Distrik Yapen Selatan berbatasan langsung sebelah Utara Distrik Yapen Utara; sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Seireri; sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Kosiwo; dan sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Angkaisera. Kondisi penutupan lahan (hutan) berada pada kisaran 32,4-39,4%.

Umumnya, wilayah ini permukiman yang berada pada pesisir dan daratan dengan dominasi topografi berombak berformasi geologi Alluvium, kapur, dan batu gamping wurui. Bentuk wilayah (topografi) distrik ini didominasi datar hingga berombak dan berbukit (Tabel 4.2) Topografi dan formasi geologi ini, kemudian menentukan jenis dan kesuburan tanah di distrik ini sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3. dan 4.4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa umumnya jenis tanah didominasi oleh Ordo Alfisol dan Entisol dengan tekstur pasir dan liat mendominasi pada daerah ini.

Tabel 4.1
Luas Kelurahan/Kampung pada Distrik Yapen Selatan

No	Kelurahan/Kampung	Luas	
		(Ha)	(%)
1.	Banawa	120,21	2,06
2.	Famboaman	612,31	10,50
3.	Mantembu	1.834,77	31,48
4.	Mariadei	571,53	9,81
5.	Pasir Hitam	38,15	0,65
6.	Pasir Putih	20,74	0,38
7.	Serui Laut	160,19	2,74
8.	Turu	319,27	5,47
9.	Warari	666,48	11,44
10.	Yapen	965,08	16,56
11.	Anotaurei	248,95	4,27
12.	Serui Jaya	39,33	0,67
13.	Serui Kota	166,11	2,85
14.	Tarau	65,35	1,12
	Laut	8213,31	
Total		14041,78	100,00

Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Kep. Yapen (Tim Pembuatan Peta Blueprint Kab. Kep. Yapen, Provinsi Papua, 2015). Keterangan: Persentase luasan kelurahan/kampung berdasarkan luas daratan

Tabel 4.2
Luasan dan Bentuk Wilayah di Distrik Yapen Selatan.

No	Bentuk Wilayah	Luas	
		(ha)	(%)
1.	Datar :	848,70	14,56
	-Datar (0 - 3 %)	848,70	14,56
2.	Berombak :	2.463,34	42,26
	- Agak Landai (3 - 5 %)	1.360,49	23,34
3.	- Agak Landai (5 - 8 %)	1.102,85	18,92
	Bergelombang :	531,02	9,11
	- Landai (8 - 15 %)	531,02	9,11
4.	Berbukit :	897,08	15,39
	- Agak Curam (15 - 25 %)	415,02	7,12
	- Curam (25 - 45 %)	482,06	8,27
5.	Bergunung :	1.088,86	18,68
	- Sangat Curam (> 45)	1.088,86	18,68
Total		5.829,00	100,00

Sumber: Analisis Citra Landsat, SPOT dan Quicbird, dan Analisis Tim, 2015.

Keterangan: Persentase luasan kelurahan/kampung berdasarkan luas daratan.

Kondisi Pendidikan di Distrik Yapen Selatan dapat dilihat dari beberapa variabel, meliputi: infrastruktur pendidikan (jumlah bangunan SD sampai dengan SMA), jumlah tenaga pengajar/guru (SD hingga SMA), dan jumlah

murid (SD hingga SMA). Adapun pengukuran variabel tersebut berdasarkan basis kampung.

Tabel 4.3

Bangunan TK dan SD Kampung/Kelurahan pada Distrik Yapen Selatan.

No.	Kampung	Jumlah TK		Jumlah SD		
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	SD/MI Swasta
1.	Kampung Mantembu	-	-	-	1	-
2.	Kampung Mariadei	-	-	-	1	-
3.	Kampung Serui Laut	-	-	-	1	-
4.	Kampung Banawa	-	-	1	-	-
5.	Kampung Warari	-	-	1	-	-
6.	Kampung Turu	-	-	-	1	-
7.	Kampung Pasir Hitam	-	-	-	-	-
8.	Kampung Pasir Putih	-	-	1	-	-
9.	Kampung Yapan	-	-	-	-	-
10.	Kampung Famboaman	-	-	1	-	-
11.	Kelurahan Anotarei	1	2	2	1	-
12.	Kelurahan Tarau	-	4	2	-	-
13.	Kelurahan Serui Kota	-	4	3	3	1
14.	Kelurahan Serui Jaya	-	2	1	1	-
Jumlah		1	12	12	9	1

Sumber: Analisis Tim, 2015.

Secara keseluruhan, terdapat 13 bangunan TK dan 22 bangunan SD, 8 bangunan SMP, dan 7 bangunan SMA di Distrik Yapen Selatan. Dari jumlah infrastruktur pendidikan tersebut, Kelurahan Serui Kota merupakan kelurahan yang memiliki jumlah bangunan SD, SMP, dan SMA/SMK.

Tabel 4.4

Bangunan SMP dan SMA Kampung/Kelurahan pada Distrik Yapen Selatan

No.	Kampung	Jumlah SMP				Jumlah SMA			
		Negeri		Swasta	MTS Swasta	Negeri	Swasta	Unggulan	SMK
		Biasa	Satu Atap						
1.	Kampung Mantembu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kampung Mariadei	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kampung Serui Laut	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kampung Banawa	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	Kampung Warari	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kampung Turu	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kampung Pasir Hitam	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kampung Pasir Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kampung Yapan	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kampung Famboaman	-	-	-	-	1	1	-	-
11.	Kelurahan Anotarei	1	-	-	-	-	1	-	-

12.	Kelurahan Tarau	-	-		1	-	-	-	-
13.	Kelurahan Serui Kota	-	-	3	-	1	-	-	3
14.	Kelurahan Serui Jaya	-	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah		2	-	5	1	2	2	-	3

Sumber: Bappeda Kepulauan Yapen Thn. 2015

Meski demikian, jumlah bangunan pendidikan tidak seiring dengan ketersediaan sumberdaya pendidikan. Dari data yang diperoleh menunjukkan sebanyak 591 orang guru yang tersebar di Distrik Yapen Selatan dengan komposisi terdiri dari: 251 orang guru SD, 123 orang guru SMP, dan 217 orang guru SMA. Adapun sebaran guru menurut tingkatan pendidikan berbasis kampung dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Jumlah Guru pada Tingkat Pendidikan di Distrik Yapen Selatan

No.	Kampung	Jumlah Guru		
		SD	SMP	SMA/SMK
1.	Kampung Mantembu	18	-	-
2.	Kampung Mariadei	19	-	-
3.	Kampung Serui Laut	14	-	-
4.	Kampung Banawa	19	17	-
5.	Kampung Warari	10	25	-
6.	Kampung Turu	15	-	-
7.	Kampung Pasir Hitam	-	-	-
8.	Kampung Pasir Putih	11	-	-
9.	Kampung Yapen	-	-	-
10.	Kampung Famboaman	3	-	76
11.	Kelurahan Anotareui	5	10	29
12.	Kelurahan Tarau	37	12	-
13.	Kelurahan Serui Kota	70	45	115
14.	Kelurahan Serui Jaya	30	14	-
Jumlah		251	123	220

Sumber: Bappeda Kepulauan Yapen Thn. 2015

Tabel 4.5 menunjukkan adanya kesenjangan ketersediaan guru antar tingkatan pendidikan dengan kampung, dimana Kelurahan Serui Kota yang memiliki guru terbanyak pada semua tingkat pendidikan. Persoalan lainnya yang ditemukan adalah rasio antara guru dan murid yang tidak seimbang. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan ratio guru dan murid di Distrik Yapen Selatan sebanyak 6 dan 7 Artinya, 1 orang guru mempunyai beban

tanggungjawab mengajar sebanyak 6 dan 7 murid untuk seluruh tingkatan pendidikan. Sedangkan ratio masing-masing tingkatan pendidikan di Distrik Yapen Selatan, sebagai berikut: 6 untuk SD, 6 untuk SMP, dan 7 untuk SMA.

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian dari pengelolaan dana prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun Anggaran 2015.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan responden atau informan, maka diperoleh data dan indicator atau variabel penelitian sebagai berikut :

a. Perencanaan Program PNPM Mandiri Prospek (*Planing*)

Dalam perencanaan program PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan diperoleh data dari pertanyaan tentang keterlibatan dalam perencanaan antara Kepala Kampung, Tim Pengelola, Bamuskam dan Kelompok Masyarakat diperoleh data bahwa adanya koordinasi dan komunikasi timbal balik antara elemen-elemen tersebut. Diperoleh informasi bahwa kepala kampung selalu melibatkan masyarakat yang menerima kegiatan atau kelompok yang masih menunggu kegiatan program yang hendak dilaksanakan. Dalam hal perencanaan program, dilakukan melalui musyawarah bersama dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kepala Kampung dan Bamuskam hadir sebagai pemimpin dan pengarah bersama-sama dengan Tim Pengelola PNPM Mandiri Prospek untuk merencanakan segala kebutuhan kampung agar menjadi prioritas pembangunan. Koordinasi yang dibangun antar

stakeholder tersebut termuat di dalam Rencana Pembangunan Kampung atau rencana bersama masyarakat (RBM), dengan muatan anggaran berdasarkan rencana tersebut dituangkan dalam Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP). Adapun tahapan yang dilakukan di dalam perencanaan di Kampung Pasir Putih adalah sebagai berikut :

- 1) Pendataan Awal ; pendataan awal ini dimaksudkan untuk pra sosialisasi program, identifikasi nama calon yang hadir di dalam musyawarah distrik, menginformasikan jadwal musyawarah distrik, membuat sketsa kampung yang berisi dana, selain itu juga mengetahui jumlah penduduk kampung, kategori kampung, potensi dan lokasi pembangunan di kampung.
- 2) Pelatihan Pelaku ; tujuan dari pelatihan pelaku adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan kampung, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Pelatihan ini dilakukan dengan sasaran/target adalah Tim Pengelola Kegiatan Kampung (TPKK), Pendamping Kampung, Tim Penulis Usulan, Tim Verifikasi, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan Kepala Kampung, Tim Tiga Tungku, dan Tim Pengelola Kegiatan distrik (TPKD).
- 3) Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM) ; perencanaan bersama masyarakat adalah serangkaian tahapan dalam upaya menyusun program dengan memanfaatkan potensi dan kapasitas local yang ada di kampung. Tahapan dari PBM ini antara lain adalah : penyempurnaan data awal, penyempurnaan peta sosial kampung, penggalan gagasan,

penulisan usulan, verifikasi usulan, kompetisi usulan (perengkingan usulan), pembuatan desain dan RAB, musyawarah kampung penetapan usulan.

Dari ketiga proses sebagai termuat di atas, telah dilakukan semaksimal mungkin dalam pengelolaan dana prospek tersebut. semua jawaban yang diberikan mengarah pada suatu kesimpulan bahwa proses perencanaan program telah berjalan secara maksimal, walau proses ini sering berjalan sangat alot dan demokratis karena tingkat nalar masyarakat kampung yang berada pada tataran pendidikan menengah ke atas. Sehingga hasil pemikiran tersebut menjadi suatu hasil yang mengarah pada kepentingan umum bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu.

b. Pengorganisasian Program PNPM Mandiri Prospek (*Organizing*)

Musyawarah kampung persiapan pelaksanaan adalah suatu forum dalam rangka pengorganisasian program PNPM Mandiri Prospek. Forum ini mensosialisasikan hasil yang telah dilakukan dalam PBM dan mempersiapkan rencana kegiatan serta bersama bersepakat mengenai RKT Lokal, sanksi lokal, pemilihan Tim Sukarelawan Pemantau Kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan; Sistem Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

c. Pelaksanaan Pengelolaan Program PNPM Mandiri Prospek (*Actuating*)

Untuk pelaksanaan pengelolaan Program PNPM Mandiri Prospek dimulai dengan pencairan dana Tahap I (Pertama) dengan alur prosedur : ketua TPKK mengajukan dana pencairan tahap I sebesar 55% ke TPKD dengan

menyerahkan rencana penggunaan dana dengan melampirkan SPPB. Selanjutnya TPKD, PD dan PJOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat, maka TPKD menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan. TPKD bersama TPCK mencairkan dana untuk dikelola oleh bendahara TPCK.

d. Evaluasi Program PNPM Mandiri Prospek (*Controlling*)

Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa hal yang akan dibahas yaitu apa yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, di mana proses evaluasi diadakan, dan pihak yang mengadakan evaluasi. Hal yang perlu dilakukan evaluasi tersebut adalah narasumber yang ada, efektifitas penyebaran pesan, pemilihan media yang tepat dan pengambilan keputusan anggaran dalam mengadakan sejumlah promosi dan periklanan. Evaluasi tersebut perlu diadakan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan pembiayaan, memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif strategis yang ada, meningkatkan efisiensi iklan secara general, dan melihat apakah tujuan sudah tercapai. Di sisi lain, perusahaan kadang-kadang enggan untuk mengadakan evaluasi karena biayanya yang mahal, terdapat masalah dengan penelitian, ketidaksetujuan akan apa yang hendak dievaluasi, merasa telah mencapai tujuan, dan banyak membuang waktu. Secara garis besar, proses evaluasi terbagi menjadi di awal (*pretest*) dan diakhir (*posttest*). *Pretest* merupakan sebuah evaluasi yang diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan. Sedangkan, *posttest*

merupakan evaluasi yang diadakan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk analisis situasi berikutnya.

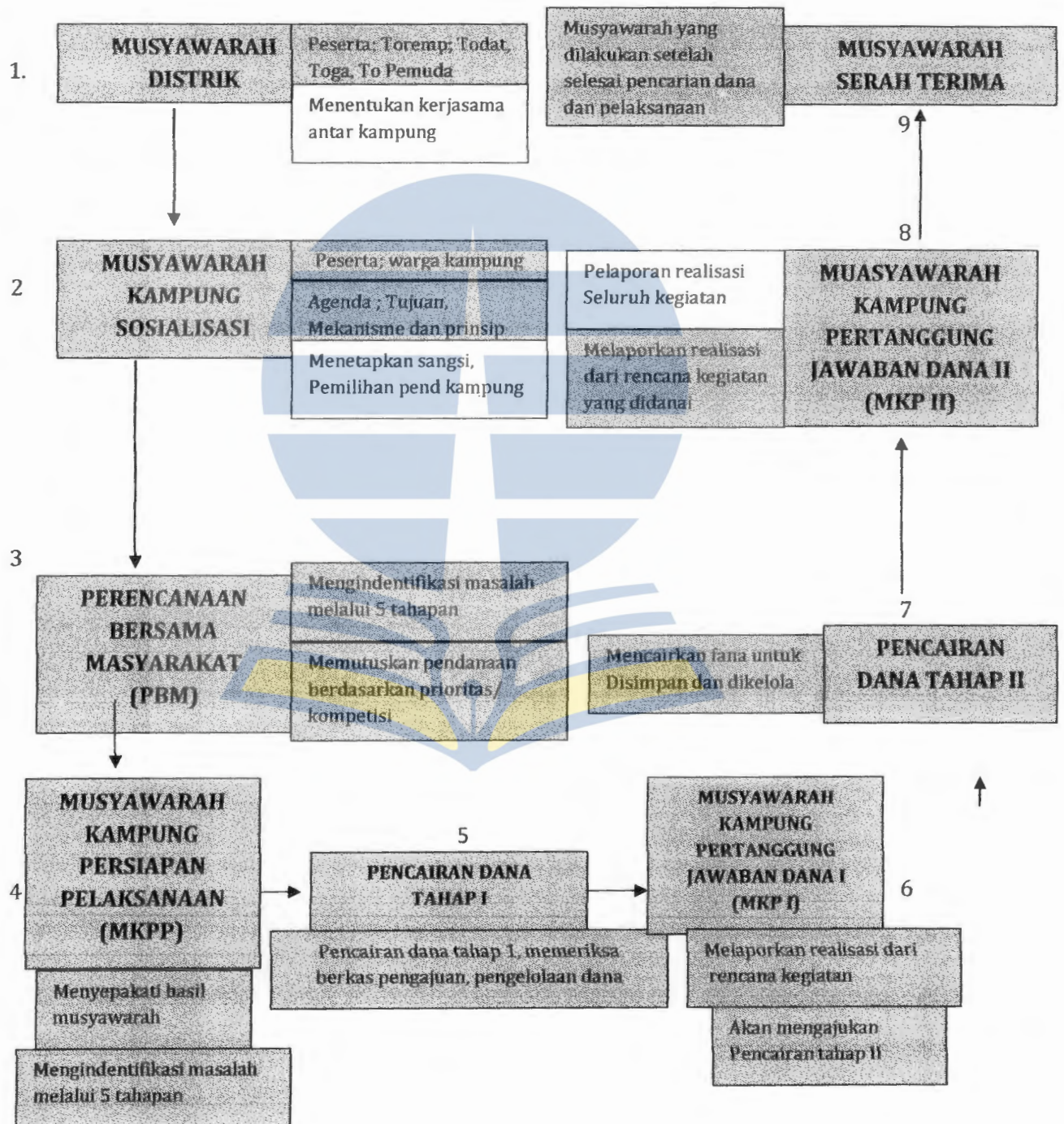
Evaluasi dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Evaluasi yang diadakan di dalam ruangan pada umumnya menggunakan metode penelitian laboratorium dan sampel akan dijadikan sebagai kelompok percobaan. Kelemahannya, realisme dari metode ini kurang dapat diterapkan. Sementara, evaluasi yang diadakan di luar ruangan akan menggunakan metode penelitian lapangan di mana kelompok percobaan tetap dibiarkan menikmati kebebasan dari lingkungan sekitar. Realisme dari metode ini lebih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformulasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian.

Evaluasi program PNPM Mandiri Prospek merupakan tahap kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan. Dimulai dengan musyawarah kampung pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai dengan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap I.

Berikut ini adalah Alur Tahapan Pengelolaan PNPM Mandiri Prospek sebagai berikut :

Gambar 4.1 Alur Tahapan Pelaksanaan



B. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Prospek

Deskripsi pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih diawali dengan perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan dan pengontrolan dilakukan dengan semaksimal mungkin. Namun masih terdapat kendala dalam implementasi program tersebut. mengawali program dengan perencanaan yang sangat komprehensif, dihadiri oleh lapisan masyarakat, aparatur kampung dan bamuskam, memberikan gambaran bahwa perencanaan telah memnuhi standar-standar perencanaan komprehensif. Namun masalah yang timbul dalam perencanaan adalah tarik menarik kepentingan antara elemen dan kelompok masyarakat. data yang diperoleh dilapangan menggambarkan bahwa Kepala Kampung masih memegang peranan yang cukup kuat. Sehingga kepala kampung dapat membijaki semua keputusan yang telah ditetapkan diawal. Pendamping kampung yang hadir dan memberikan pendampingan sering menjadi subyek sebuah kebijakan kepala kampung. Adanya tarik menarik antara pendamping dan kepala kampung melemahkan tujuan dari implementasi dana PNPM Mandiri Prospek.

Dalam pengorganisasi, digambarkan bahwa, Kepala Kampung dan Bamuskam belum terorganisir dan memiliki kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program. Tahapan-tahapan yang diatur sebagaimana peraturan Gubernur, tidak dilaksanakan secara efektif. Masih adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Misalnya laporan pertanggungjawaban yang harus

dievaluasi dalam musrenbang tahap I, biasanya jarang untuk dilaksanakan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran di tahap II (kedua).

2. Faktor-faktor

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pengelolaan Dana PNPM Mandiri Prospek terdiri dari beberapa faktor. Keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1974), antara lain dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan, faktor manusia, faktor peralatan, faktor finansial, faktor ekonomi, budaya dan politik.

Faktor isi kebijakan memiliki peranan yang penting, karena dari sinilah proses pengelolaan diatur. Dari hasil pengamatan dan wawancara diperoleh data bahwa isi kebijakan telah dilaksanakan atau disosialisasikan dengan baik, sehingga isi dari kebijakan tersebut minimal telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana program tersebut.

Faktor manusia atau sumber daya manusia. Rendahnya pendidikan berbagai elemen di kampung pasir putih berdampak pada sikap perilaku yang negatif terhadap program PNPM Mandiri Prospek. Perilaku ini juga lahir dari budaya kampung setempat. Menurut Koentjoroningrat (1996), budaya merupakan nilai-nilai dan akal budi yang tersimpan dalam diri seseorang atau kelompok orang yang dapat diinterpretasikan melalui sikap dan perilaku orang atau kelompok tersebut. Sehingga latar belakang budaya mempengaruhi keberhasilan sebuah program. Masyarakat Kampung Pasir Putih memiliki karakter yang cukup bervariasi pada umumnya karena kehidupan masyarakat ini berada di pinggiran kota, sehingga budaya majemuk dari berbagai suku telah mempengaruhi budaya setempat. Namun gaya patriarlistik klien dalam

pemerintahan kampung tetap ada dan memberikan kekuatan kepada pemimpin dari garis keturunan ayah. Suara mereka yang harus lebih didengar dibanding dengan suara lainnya. Hal inilah yang melemahkan kebijakan program PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih.

Selain itu, dukungan masyarakat terhadap program masih minim, disebabkan karena kurang diakomodirnya kepentingan rakyat oleh Kepala Kampung sehingga melemahkan peran serta masyarakat dalam program tersebut.

Finansial juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Keterbatasan anggaran dana menyebabkan tarik menarik dalam pengelolaan dana tersebut. adanya kelompok masyarakat yang dilayani terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh kelompok lainnya.

3. Upaya-upaya

3.1 Komunikasi Efektif

Berbicara mengenai komunikasi tentu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, bahkan mungkin sejak awal keberadaan manusia itu sendiri. Hampir semua kegiatan manusia dalam kesehariannya membutuhkan atau setidaknya disertai komunikasi. Istilah komunikasi (*communication*) sendiri secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *communicatus* yang bersumber dari kata *communis*. Dalam kata *communis* ini memiliki makna “berbagi” atau “menjadi milik bersama”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada proses pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dalam pengertian ini yang terlibat

komunikasi disini adalah manusia. Harold Lasswell dalam karyanya *The Structure and Function of Communication in Society* mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Komunikator (siapa yang mengatakan?)
 2. Pesan (mengatakan apa?)
 3. Media (melalui saluran /channel/media apa?)
 4. Komunikan (kepada siapa?)
 5. Efek (dengan dampak / efek apa?)
- Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana menyebutkan bahwa proses komunikasi itu ketika komunikator membentuk sebuah pesan (encode) kemudian menyampaikan melalui saluran tertentu kepada komunikan yang menimbulkan efek tertentu

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mensukseskan program PNPM Mandiri Prospek adalah melalui koordinasi dan komunikasi bersama antar stakeholder. Karena dengan melalui duduk bersama dan berbicara bersama dapat mengidentifikasi segala permasalahan yang ada dan mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Upaya yang telah dilakukan adalah dukungan dari pemerintahan Distrik Yapen Selatan yang memberikan bantuan bimbingan dalam pengelolaan program PNPM Mandiri Prospek. Diikuti juga dengan intervensi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memberikan informasi dan sosialisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri Prospek. Pentingnya komunikasi dan koordinasi

memberikan arah dan gambaran terhadap pelaksanaan program atau pengelolaan mandiri prospek secara jelas dan tegas. Adanya mekanisme yang diatur bersama antara kepala kampung dan segenap stakeholder yang ada.

3.2 Kepemimpinan efektif

Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Cara dan gaya kepemimpinan dari seorang kepala kampung perlu diperhatikan secara baik dalam rangka mengakomodir semua kepentingan masyarakat kampung yang ada. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu

tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Gaya kepemimpinan yang demokratis akan memberikan nuansa yang terbaik terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek. Karena dengan gaya kepemimpinan demokratis, maka dengan sendirinya seorang pemimpin akan melibatkan keseluruhan stakeholder yang ada di kampung tersebut untuk terlibat di dalam pembangunan kampung.

3.3 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang menuju pembentukan kepribadian melalui pemahaman mengenai kesadaran terhadap peran diri yang dijalankan dan peran yang dijalankan orang lain. Sosialisasi juga dapat dimaknai sebagai suatu proses di mana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan (tradisi, perilaku, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan) masyarakat, yang dimulai dari lingkungan keluarganya dan kemudian meluas pada masyarakat luas, lambat laun dengan keberhasilan penerimaan atau penyesuaian tersebut, maka individu akan merasa menjadi bagian dari keluarga atau masyarakat. Pada dasarnya, setiap manusia melakukan proses sosialisasi dari lahir hingga meninggalnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dalam suatu bentuk pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, manusia dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui suatu proses. Proses penyesuaian diri

terhadap masyarakat dalam sosiologi dinamakan proses sosialisasi. Ada beberapa tahapan dalam melakukan sosialisasi, yaitu antara lain :

a. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap ini anak mulai melakukan tindakan meniru meskipun belum sempurna.

b. Tahap Meniru (*Play Stage*)

Pada tahap ini anak dapat meniru perilaku orang dewasa dengan lebih sempurna. Anak sudah menyadari keberadaan dirinya dan orang-orang terdekatnya serta mampu memahami suatu peran.

c. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Pada tahap ini anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat. Anak mulai menyadari peraturan yang berlaku.

d. Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*Generalized Stage*)

Pada tahap ini anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui dengan jelas mengenai kehidupan bermasyarakat. Anak mampu memahami peran yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat.

Fungsi Sosialisasi antara lain adalah :

- a. Membentuk pola perilaku individu berdasarkan kaidah nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Menjaga keteraturan dalam masyarakat.
- c. Menjaga integrasi masyarakat.

Dari pengertian dan tujuan pelaksanaan sosialisasi di atas, maka yang menjadi benang merah antara pelaksanaan sosialisasi dan program PNPB Mandiri Prospek adalah bagaimana kejelasan program tersebut dapat didengar, diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kampung pasir putih tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara formal atau non formal. Secara formal yaitu melalui mekanisme sosialisasi dalam tata cara pemberian informasi kepada public, baik melalui media masa, pamphlet, baliho, dan lain sebagainya. Atau juga dengan cara mengumpulkan masyarakat di balai kampung dan melakukan sosialisasi di tempat tersebut.

Sedangkan sosialisasi non formal, yaitu melalui sikap dan perilaku dari setiap pemangku kepentingan kampung seperti kepala kampung, aparatur kampung, bamuskam dan pendamping kecamatan. Sehingga dari aspek formal dan non formal kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik.

3.4 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Surya Darma,2007). Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh

program pendidikan di sekolah. Transparansi ditunjukkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbale balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Muhammad,2007). Pengelolaan dana yang transparan akan membuat orang lain dalam hal ini akan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah dapat mengetahui untuk apa saja dana sekolah itu dibelanjakan. Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator, yaitu:

- 1) mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Surya darma, 2007).

Transparansi pengelolaan keuangan secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Transparansi keuangan sekolah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintahan dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan sekolah

(Muhammad, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbale-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Surya Darma (2007:17) informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut sekolah butuh proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Sekolah perlu mendayagunakan sebagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Sekolah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat atau bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) bias ditempel di papan pengumuman di ruangan guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini tentu akan menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah (Surya Darma, 2007:22). Istilah transparansi dalam bentuk konteks

pendidikan, sangatlah jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah, dimana data yang dilaporkan sekolah mencerminkan realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (stakeholders). Oleh karena itu, transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sekolah.

Menurut Muhammad (2007:46), upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi sekolah kepada publik, antara lain :

- 1) Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung dan tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.
- 2) Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.
- 3) Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sempat ke publik.
- 4) Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.
- 5) Keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh indicator sebagai berikut:

- a) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa.
- b) Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.
- c) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah dan;
- d) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muhammad, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah semua keputusan yang diambil secara terbuka dan berdasarkan fakta obyektif. Transparansi mempersyaratkan ketersediaan informasi yang akurat dan cermat. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi sehingga orang dapat menggunakannya untuk melacak penyalahgunaan wewenang dan memperjuangkan kepentingan mereka. Sedangkan indicator yang digunakan adalah :

- 1) bertambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi

keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Eterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu : (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut ; (1) publikasi dan sosialisasi

kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai stakeholders dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan Peraturan Daerah yang accountable dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait --seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah-- dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi

jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Dari pengertian transparansi di atas, maka dalam pengelolaan program PNPM Mandiri prospek di Kampung Pasir Putih harus didasarkan pada pemberlakuan transparansi public. dimulai dari proses perencanaan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan, tahapan pelaksanaan program hingga pada tahapan evaluasi. Alur dan mekanisme serta bukti pertanggung jawaban harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jangan ada data manipulasi dan fiktif, karena dampak atau efek dari tidak transparansi akan melemahkan kepercayaan public. hal ini dapat diikuti dengan sikap apatis dan non partisipatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan kampung.

3.5 Bertanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul,

menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab. apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Tanggung jawab adalah cirri manusia yang beradab. manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Tanggung jawab dalam konteks pengelolaan PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan adalah bagaimana setiap elemen atau stakeholder dalam perannya masing-masing dapat secara efektif dan efisien melakukan tugasnya masing-masing. Beban dan kapasitas yang dipikul oleh setiap elemen, baik kepala kampung, apatur kampung, bamuskam, pendamping dan juga masyarakat harus dapat melakukan fungsinya secara maksimal, dengan kata lain masing-masing stakeholder dapat bertanggung jawab dalam keterlibatannya sebagai contributor keberhasilan program PNPM Mandiri Prospek. Tanggung jawab ini memiliki konsekuensi berupa hukum positif dan hukum non positif, atau pidana dan sanksi moral apabila ada yang melanggar hukum tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi pengelolaan program PNPM Mandiri Prospek yang terjadi di kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Komunikasi antar elemen atau stakeholder telah dilakukan namun masih belum efektif. Tahapan-tahapan yang dilalui melalui mekanisme aturan berjalan belum maksimal, hal ini diindikasikan dengan penyerapan dan pertanggungjawaban yang berjalan hingga melewati masa waktu. Bahkan evaluasi program tidak dilakukan dengan baik, sehingga tahapan pemberian dana selanjutnya menjadi terhambat.
2. Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya program pengelolaan PNPM Mandiri Prospek antara lain adalah faktor manusia, dukungan dana, peralatan, budaya, ekonomi dan politik.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka suksesnya program pengelolaan PNPM Mandiri Prospek adalah melalui komunikasi intensif antar elemen dan kelompok kepentingan. Duduk dan berbicara secara demokrasi dan ikut sertanya masyarakat dalam pelaksanaan program dimulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan/pelaksanaan (*actuating*) dan evaluasi/control (*controlling*) akan lebih meningkatkan hasil

pencapaian program PNPM Mandiri Prospek tersebut. upaya pendampingan secara berkala dan berkesinambungan serta meningkat secara kuantitas serta kualitas dari pendamping kampung atau pun distrik akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja program tersebut.

Selain hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah melalui pembekalan dalam pengelolaan keuangan, agar proses pertanggungjawaban dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.

B. SARAN

Saran yang ditulis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendampingan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dari masing-masing elemen kampung, seperti Kepala Kampung, Aparat Kampung, Bamuskam, masyarakat, Pembina Distrik, Bank Papua, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar memperoleh tahapan dan mekanisme yang sama dan baku dalam pengelolaan program PNPM Mandiri Prospek.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap tugas-tugas pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Distrik, sehingga adanya suatu persepsi yang sama dalam pengelolaan dana tersebut.
3. Perlu adanya perbedaan pemberian dana disesuaikan dengan jumlah, kebutuhan dan karakteristik dari Kampung-kampung yang ada. Misalnya di kampung Pasir Putih, harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada berdasarkan kepadatan dan jarak dari kota Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jusuf Udayana, Lic.Ec, (2013) *Manajemen Strategik*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Heru Nograho (2001), *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Pustaka Pelajar-Jogyakarta
- Jusuf Suit Almasdi (1995) “ *Aspek sikap Mental dalam Manajemen Sumberdaya Manusia* ”
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Remaja
- Nasution, S, (1992), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung
- Prasetya Irawan (2005) “*Metodologi Penelitian Administrasi*” Bahan ajar Universitas Terbuka.
- Patton. Michael Quinn (2002). *Qualitative Research and evaluation Methods*. Sage Publication : Thousands Oaks-California
- Pheni Chalid (2012) “ *Teori dan Isu Pembangunan* ” Bahan Ajar Universitas Terbuka
- M.H. Matondang, (2008), *Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi*, Yogyakarta. Graha Ilmu
- Richard.I. Daft, (2002), *Manajemen*, Edisi ke Lima Jilid 1, Jakarta Erlangga (terjemahan).
- Ricky W. Griffin, (2004), *Manajemen*, Edisi 7, Jakarta, Salemba Empat (terjemahan)
- Stephen P. Robbins, (1990), *Teori Organisasi, Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta, Arcan.
- Veithzal Rivai, (2004), *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Petunjuk Teknis Operasional Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa pemberian stimulant Pembangunan Desa Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan yapen.
- Tarsito, 1996, *Metode Reseach*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suharto.Edi, (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Startegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial da Pekerjaan Sosial*, Bandung, PT. Revika Aditama.

Sondang, Sondang. P. (1990), *Filsafat Administrasi* , Jakarta, Cv. Haji Masagung.

B. Peraturan

....., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Dirjen Perundang-undangan Depdagri di Jakarta.

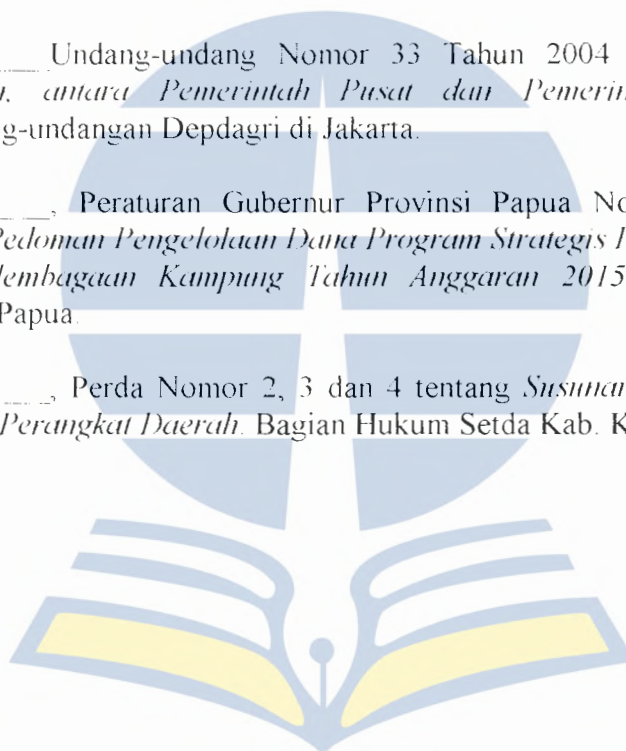
.....Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*, Dirjen Perundang-undangan Depdagri di Jakarta

.....Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Dirjen Perundang-undangan Depdagri di Jakarta.

.....Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan keuangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Dirjen Perundang-undangan Depdagri di Jakarta.

....., Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 86 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung Tahun Anggaran 2015*, Biro Hukum Setda Provinsi Papua.

....., Perda Nomor 2, 3 dan 4 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah*. Bagian Hukum Setda Kab. Kepulauan Yapen



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA
JUDUL TESIS
STRATEGI PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN PNPM MANDIRI
PROSPEK DI KAMPUNG PASIR PUTIH DISTRIK YAPEN SELATAN
(Suatu Tinjauan Terhadap Tahapan Dan Proses Pengelolaan Dana
berdasarkan Pergub nomor 86 Tahun 2015)

PERTANYAAN PENELITIAN/RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pengelolaan dana pemberdayaan kampung di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen sdah seuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen
3. Bagaimana Strategi yang dipakai ketika ada permasalahan dalam pengelolaan dana tersebut mulai dari perencanaan, pembiayaan dan pertanggung jawaban serta realisasi program secara nyata dilapangan.
4. Indentitas sumber informan

Nama : Yosafat Waimbo

Jabatan : Ketua PJOK Program Distrik yapen Selatan

Tanggal : 05 April 2016

QUISIONER

1. VARIABEL PERANAN PELAKU PROGRAM

a. Indikator Perencanaan Program

- Apakah Tim Pengelolah Kegiatan Kampung Pasir Putih dalam Pengelolaan Program PNPM Mandiri melalui dana Pemberdayaan Prospek selalu melibatkan kepala kampung dalam hal berkoordinasi ?
- Bagaimana peran kepala kampung dan TPKK dalam perencanaan dan penganggaran program sudah melibatkan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat ?
- Strategi apa yang digunakan oleh Kepala Kampung dan Bamuskam tapi juga TPKK selaku pelaku program secara langsung apabila masyarakat partisipasi masyrkat kurang dalam mendukung program tersebut ?

b. Indikator Pengelolaan Anggaran Dana Pemberdayaan

- Apakah dalam penggunaan anggaran pemberdayaan kampung dilakukan secara transparansi ?
- Apakah dalam pengelolaan dana sudah melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur sesuai petunjuk penggunaan dana tersebut ?
- Apakah dana tersebut dalam penggunaan ada mengalami perubahan pembiayaan?
- Kalau ada untuk membiayai kegiatan apa saja ?

c. Indikator Evaluasi Dana Pemberdayaan

- Dalam penggunaan dana Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek ini Tim Pengelolah Kegiatan Kampung Pasir Putih Selalu memberikan Laporan Kepada Kepala Kampung dan Bamuskam ?
- Apabila dalam penggunaan dana selama ini masyarakat diberikan ruang untuk memberikan saran dan usul sebagai evaluasi terhadap pelaku Program ?
- Apakah TPKK selalu meberikan laporan kepada Pemerintah atasan secara berjenjang dan berkala ?

2. VARIABEL PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN KAMPUNG

1. Apakah penggunaan pengelolaan dana pemberdayaan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang telah diatur ?
2. Apakah dilakukan pembinaan dari pemerintah berupa sosialisasi atau pelatihan dalam penggunaan dana kampung ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan dana selama ini ?
4. Dalam Pengelolaan apabila mengalami hambatan apa strategi yang dilakukan TPKK dan Kepala kampung serta Bamuskan Dalam menyelesaikan permasalahan terhadap program tersebut ?
5. Bagaimana dukungan dan tingkat partisipasi terhadap program Pemberdayaan PNPM Mandiri Prospek Di Kampung Pasir Putih ?

Serui, 05 April 2016
Mahasiswa

Since A. Wihiyawari
Nim. 500660927

Transkrip Wawancara I

Nama Informan : YOSAFAT WAIMBO
 Jabatan : KETUA PJOK DISTRIK YAPEN SELATAN
 Hari/Tanggal : Selasa, 5 April 2015
 Pukul : 10.30 wit
 Tempat : Rumah Kediaman
 Kode : 1/kps/2016

Saudara Yosafat Waimbo adalah petugas

Peneliti : Selamat Pagi Bapak.
 Informan : Selamat Pagi
 Peneliti : Mohon maaf, saya mengganggu waktu kerja Bapak
 Informan : O, tidak apa-apa, bagaimana, ada yang bisa saya bantu?
 Peneliti : Begini Pak, sebagaimana pembicaraan sebelumnya, bahwa saya akan melakukan penelitian tentang Pengelolaan PNPM Mandiri Prospek, sehingga saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut pelaksanaan kegiatan prospek tersebut.
 Informan : O, iya, benar. Silahkan,..
 Peneliti : Begini pak, tulisan atau peneitian saya ini mengenai pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek di Kampung Pasir Putih, pertanyaan saya, adalah, apakah bapak melakukan koordinasi dengan kepala kampung dalam pengelolaan dana tersebut ?
 Informan : Ya, selalu melibatkan kepala kampung.
 Peneliti : Bagaimana peran kepala kampung dan TPKK dalam perencanaan dan penganggaran program sudah melibatkan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat ?
 Informan : Sudah melibatkan mamsyarakat sebagai penerima manfaat.
 Peneliti : Strategi apa yang digunakan oleh Kepala Kampung, Bamuskam dan TPKK selaku pelaku program secara langsung apabila terdapat partisipasi yang kurang dari masayarakat?
 Informan : Strategi yang digunakan adalah ppendekatan, kemudian memberikan pemahaman ttng fungsi

- dan tujuan dari program.
- Peneliti : Apakah dalam penggunaan anggaran pemberdayaan kampung dilakukan secara transparan ?
- Informan : Kami usahakan transparan semaksimal mungkin.
- Peneliti : Transparansi dalam bentuk apa ?
- Informan : Kami buat dalam laporan pertanggungjawaban, dan setiap pertanggungjawaban dilakukan dalam musyawarah kampung, sebagaimana diatur di dalam peraturan gubernur provinsi Papua
- Peneliti : Apakah dalam pengelolaan dana sudah melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur sesuai petunjuk penggunaan dana tersebut?
- Informan : Sudah sesuai
- Peneliti : Apakah dana tersebut dalam penggunaan ada mengalami perubahan pembiayaan ?
- Informan : Penggunaan dana ada juga yang mengalami perubahan. Biasanya terjadi karena kondisi di lapangan, seperti lokasi dan kebutuhan bahan yang bervariasi. Misalnya kalau pembangunan fisik, di daerah kampung pasir putih bagian utara atau ke bagian daratannya, terdiri dari rawa-rawa, sehingga pembangunan harus memperhitungkan lokasi yg ada
- Peneliti : Apakah TPKK selalu memberikan laporan kepada kepala kampung dan bamuskam ?
- Informan : Selalu memberikan laporan, atau juga laporan melalui musyawarah pertanggungjawaban kegiatan
- Peneliti : Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan usul dalam evaluasi terhadap pelaku program ?
- Informan : Jarang untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan usul.
- Peneliti : Apakah penggunaan pengelolaan dana pemberdayaan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ?
- Informan : Sudah sesuai, namun terkadang pemahaman masyarakat yang belum seluruhnya memahami dengan baik program PNPM Mandiri prospek tersebut
- Peneliti : Apakah dilakukan pembinaan dari pemerintah berupa sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan dana kampung ?

- Informan : Biasanya sebelum dilakukan kuncuran program, pemerintah memberikan sosialisasi dalam bentuk musyawarah kampung, namun keterlibatan masyarakat masih kurang dan belum terlibat secara aktif dalam perencanaan program
- Peneliti : Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana selama ini ?
- Informan : Factor penghambat pengelolaan dana adalah kurang kerjasamanya antara antara TPKK, Kepala Kampung, Bamuskam dan Masyarakat. khusus pemahaman masyarakat terhadap program PNPM Mandiri Prospek tersebut
- Peneliti : Apabila terdapat masalah seperti yang disampaikan tadi, maka strategi apa yang digunakan oleh saudara untuk menyelesaikannya ?
- Informan : Biasanya saya datangi kepala kampung, bamuskam dan masyarakat untuk mendiskusikan pemecahan masalah tersebut, selanjutnya mengambil keputusan penyelesaian masalah tersebut
- Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PNPM Mandiri Pprospek ?
- Informan : Partisipasi masyarakat masih sangat kurang, karena kurangnya kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan program PNPM Mandiri Prospek tersebut.
- Peneliti : Baik pa, wawancara saya cukupkan disini, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban yang bapak berikan.
- Informan : Sama-sama, apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan datang lagi. (Lalu berjabat tangan).

Transkrip Wawancara 2

Nama Informan : YOHANIS MABUI, SE
 Jabatan : KEPALA KAMPUNG PASIR
 PUTIH
 Hari/Tanggal : Selasa, 5 April 2015
 Pukul : 12.00 wit
 Tempat : Rumah Kediaman kepala
 kampung di Pasir putih
 Kode : 02/kps/2016

Saudara adalah kepala kampung Pasir Putih yang terpilih untuk periode tahun sd.

Peneliti : Selamat Siang pa.
 Informan : Selamat siang
 Peneliti : Maaf, mohon ijin melakukan wawancara.
 Informan : Baik, silahkan, ada yg bisa saya bantu ?
 Peneliti : Maaf, saya sedang melakukan penelitian tentang dana pemberdayaan kampung PNPM Mandiri Prospek Provinsi Papua, khususnya tentang pengelolaan dana tersebut. oleh karena itu, saya akan melakukan wawancara atau cerita2 dengan bapak. Boleh k ?
 Informan : Ok, Silahkan...
 Peneliti : Apakah bapak melakukan koordinasi dengan kepala kampung dalam pengelolaan dana tersebut ?
 Informan : Ya
 Peneliti : Bagaimana peran kepala kampung dan TPKK dalam perencanaan dan penganggaran program sudah melibatkan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat ?
 Informan : Saya dan TPKK selalu mellibatkan mmasyarakat, dalam setiap program, baik kelompok penerima program maupun kelompok tunggu.
 Peneliti : Strategi apa yang digunakan oleh Kepala Kampung, Bamuskam dan TPKK selaku pelaku program secara langsung apabila terdapat partisipasi yang kurang dari masayarakat?
 Informan : Saya selalu berusaha merangkul mmasyarakat yang belum ak,tif berpartisipasi untuk ikut dalam program ini.

- Peneliti : Apakah dalam penggunaan anggaran pemberdayaan kampung dilakukan secara transparan ?
- Informan : Ya
- Peneliti : Transparansi dalam bentuk apa ?
- Informan : Dalam membuat laporan secara berkala melalui musyawarah kampung
- Peneliti : Apakah dalam pengelolaan dana sudah melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur sesuai petunjuk penggunaan dana tersebut?
- Informan : Ya, sudah sesuai
- Peneliti : Apakah dana tersebut dalam penggunaan ada mengalami perubahan pembiayaan ?
- Informan : Tidak ada
- Peneliti : Apakah TPKK selalu memberikan laporan kepada kepala kampung dan banuskam ?
- Informan : Selalu
- Peneliti : Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan usul dalam evaluasi terhadap pelaku program ?
- Informan : Diusahakan adanya partisipasi masyarakat, namun sering juga masyarakat jarang memberikan saran usul.
- Peneliti : Apakah penggunaan pengelolaan dana pemberdayaan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ?
- Informan : Sudah sesuai
- Peneliti : Apakah dilakukan pembinaan dari pemerintah berupa sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan dana kampung ?
- Informan : Ya, dari distrik dan kabupaten
- Peneliti : Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana selama ini ?
- Informan : Masih kurangnya kerja sama antara stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek. Selain itu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pemanfaatan dana tersebut.
- Peneliti : Apabila terdapat masalah seperti yang disampaikan tadi, maka strategi apa yang digunakan oleh saudara untuk menyelesaikannya ?
- Informan : Sosialisasi aktif dan pendekatan langsung
- Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PNPM Mandiri Pprospek ?

Informan : Partisipasi masih kurang
Peneliti : Baik bpk kepala kmapung, saya cukupkan
pembicaraan kita sampai disini
Informan : Ok, ibu, kalau ada pertanyaan bapak siap.
Peneliti : Ok, bpk. (berjabat tangan)



Lampiran IV

Transkrip Wawancara 3

Nama Informan	:	BARNABAS REREI
Jabatan	:	KETUA BAMUSKAM KAMPUNG PASIR PUTIH
Hari/Tanggal	:	Rabu, 6 April 2015
Pukul	:	09.15 wit
Tempat	:	Rumah Kediaman ketua bamuskam kampung di Pasir putih
Kode	:	03/kps/2016

Bapak Abas Rerei adalah Ketua Bamuskam Pasir Putih yang terpilih untuk periode tahun 2012 sd. 2016 umur 46 tahun. Aktifitas sehari-hari adalah sebagai nelayan. Pendidikan terakhir adalah SLTA dan tinggal di kampung pasir putih kurang lebih 45.tahun atau sejak lahir sudah berkeluarga. 1 istri dan 3 (tiga) orang anak.

Peneliti	:	Selamat pagi pa.
Informan	:	Selamat pagi
Peneliti	:	Begini pa, sya mohon waktu untuk berbicara-bincang. Boleh k ?
Informan	:	Baik, silahkan , ada yg bisa saya bantu ?
Peneliti	:	Maaf, saya sedang melakukan penelitian tentang dana pemberdayaan kampung PNPM Mandiri Prospek Provinsi Papua, khususnya tentang pengelolaan dana tersebut. oleh karena itu, saya akan melakukan wawancara atau cerita2 dengan bapak. Boleh k ?
Informan	:	Biak, silahkan
Peneliti	:	Apakah bapak melakukan koordinasi dengan kepala kampung dalam pengelolaan dana tersebut ?
Informan	:	Ya
Peneliti	:	Bagaimana peran kepala kampung dan TPCK dalam perencanaan dan penganggaran program sudah melibatkan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat ?
Informan	:	Saya dan TPCK selalu melibatkan masyarakat, dalam setiap program, baik kelompok penerima program maupun kelompok tunggu.
Peneliti	:	Strategi apa yang digunakan oleh Kepala Kampung, Bamuskam dan TPCK selaku pelaku program secara langsung apabila terdapat

- partisipasi yang kurang dari masyarakat?
- Informan : Saya selalu berusaha merangkul masyarakat yang belum aktif berpartisipasi untuk ikut dalam program ini.
- Peneliti : Apakah dalam penggunaan anggaran pemberdayaan kampung dilakukan secara transparan ?
- Informan : Ya
- Peneliti : Transparansi dalam bentuk apa ?
- Informan : Dalam membuat laporan secara berkala melalui musyawarah kampung
- Peneliti : Apakah dalam pengelolaan dana sudah melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur sesuai petunjuk penggunaan dana tersebut?
- Informan : Ya, sudah sesuai
- Peneliti : Apakah dana tersebut dalam penggunaan ada mengalami perubahan pembiayaan ?
- Informan : Ada juga namun tidak banyak
- Peneliti : Apakah TPKK selalu memberikan laporan kepada kepala kampung dan bamuskam ?
- Informan : Kurang efektif, karena ada indikasi tanggung jawab masing-masing
- Peneliti : Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan usul dalam evaluasi terhadap pelaku program ?
- Informan : Jarang juga, kami yang biasanya menerima laporan, namun tindak lanjut belum maksimal, karena kami sebatas sampaikan dalam musyawarah kampung.
- Peneliti : Apakah penggunaan pengelolaan dana pemberdayaan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ?
- Informan : Belum maksimal
- Peneliti : Apakah dilakukan pembinaan dari pemerintah berupa sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan dana kampung ?
- Informan : Biasanya ada
- Peneliti : Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana selama ini ?
- Informan : Kerjasama dan komunikasi
- Peneliti : Apabila terdapat masalah seperti yang disampaikan tadi, maka strategi apa yang digunakan oleh saudara untuk menyelesaikannya ?
- Informan : Harus perubahan pola pikir. Dari individu ke kebersamaan

Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PNPM Mandiri Prospek ?

Informan : Partisipasi masih kurang

Peneliti : Baik bpk ketua bamuskam, demikian dulu.
Teirma kasih atas waktunya

Informan : Baik ibu, sama-sama

Peneliti : (berdiri dan berjabat tangan)



Transkrip Wawancara 4

Nama Informan : SUSANA MABUY
 Jabatan : TOKOH PEREMPUAN PASIR
 PUTIH
 Hari/Tanggal : Rabu, 6 April 2015
 Pukul : 11.30 wit
 Tempat : Pasir putih
 Kode : 16/kps/2016

Ibu Susana adalah Tokoh Perempuan Pasir Putih, umur 39 tahun. Aktifitas sehari-hari adalah sebagai Pengurus Organisasi Perempuan di Lingkungan Gereja (Ketua PW) Pendidikan terakhir adalah SMA dan tinggal di kampung pasir putih kurang lebih sejak lahir, sudah berkeluarga. 1 suami dan 4 orang anak. Dianggap sebagai tokoh perempuan, karena andil dan perhatian terhadap kaum perempuan di kampung pasir putih, aktif dalam menyuarakan persamaan gender, di tingkat distrik dan kabupaten.

Peneliti : Selamat siang mama.
 Informan : Selamat siang, anak *harah*
 Peneliti : Begini mama, sya mohon waktu untuk cerita2, bisa k?
 Informan : Bisa *yo*, bagaimana?
 Peneliti : Saya sedang melakukan penelitian, untuk itu saya mau mendapat informasi ttng pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek.
 Informan : *yo*, silahkan
 Peneliti : Apakah *mama* selaku tokoh perempuan di kampung ini, ada dikoordinasikan pengelolaan dana tersebut ?
 Informan : Jarang,
 Peneliti : Bagaimana mama, melihat peranan kepala kampung dalam pengelolaan dana ini ?
 Informan : Masih belum maksimal
 Peneliti : Menurut mama, apa yang seharusnya dilakukan ?
 Informan : Pendekatan dengan masyarakat, terbuka dan melibatkan masyarakat. Itu kunci keberhasilan program ini.
 Peneliti : Apakah dalam penggunaan anggaran pemberdayaan kampung dilakukan secara transparan ?
 Informan : Untuk perencanaan biasanya transparan, namun

- pengelolaannya masih belum transparan menurut *mama*
- Peneliti : Transparansi dalam bentuk apa ?
- Informan : Musrenbang kampung, itu bentuk transparan dalam perencanaan.
- Peneliti : Apakah dalam pengelolaan dana sudah melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur sesuai petunjuk penggunaan dana tersebut?
- Informan : sedikitnya, sudah sesuai
- Peneliti : Apakah dana tersebut dalam penggunaan ada mengalami perubahan pembiayaan ?
- Informan : *Mama* kurang tahu
- Peneliti : Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan usul dalam evaluasi terhadap pelaku program ?
- Informan : Ruang belum terbuka maksimal
- Peneliti : Apakah penggunaan pengelolaan dana pemberdayaan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ?
- Informan : *Mama* kurang tahu
- Peneliti : Apakah dilakukan pembinaan dari pemerintah berupa sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan dana kampung ?
- Informan : Ada, namun jarang
- Peneliti : Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana selama ini ?
- Informan : Menurut *mama*, komunikasi dan himbauan, biar masyarakat sadara, juga keterbukaan dari pengelolaan
- Peneliti : Apabila terdapat masalah seperti yang disampaikan tadi, maka strategi apa yang digunakan oleh saudara untuk menyelesaikannya ?
- Informan : Semua pengelola harus bekerja dengan hati, itu kunci
- Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PNPM Mandiri Pprospek ?
- Informan : Partisipasi masih sedikit
- Peneliti : Baik *mama*, demikian dulu. Terima kasih untuk waktunya
- Informan : Baik anak lurah , sama-sama. Tuhan berkati
- Peneliti : (berdiri dan menjabat tangan)

Transkrip Wawancara 5

Nama Informan : ELIA PAIDEROUW
 Jabatan : KETUA TPKK PASIR HITAM
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2015
 Pukul : 11.00 wit
 Tempat : Pasir putih
 Kode : 17/kps/2016

Elia Paiderouw adalah Tokoh Pemuda Pasir Putih, umur 38 tahun. Aktifitas sehari-hari adalah sebagai Ketua Tim Pengelolah Kegiatan Kampung Pendidikan terakhir adalah SLTA dan tinggal di kampung pasir putih kurang lebih 20 tahun. sudah berkeluarga. 1 istri dan 3 orang anak. Dipercayakan sebagai ketua tim pengelolakegiatan dalam program PNPM Mandiri Prospek. sudah tentu saudara sangat mempunyai peran penting dalam pengelolaan program dan dana tersebut.

Peneliti : Selamat siang saudara.
 Informan : Selamat siang, ibu *lurah*
 Peneliti : Begini saudara, ada waktu untuk cerita2 k?
 Informan : silahkan, bagaimana?
 Peneliti : Saya sedang melakukan penelitian, untuk itu saya mau mendapat informasi ttng pengelolaan dana PNPM Mandiri Prospek.
 Informan : Silahkan
 Peneliti : Apakah *saudara* selaku TPKK di kampung ini, ada dikoordinasikan pengelolaan dana tersebut ?
 Informan : Jarang,
 Peneliti : Bagaimana saudara, melihat peranan kepala kampung dalam pengelolaan dana ini ?
 Informan : Masih belum maksimal
 Peneliti : Menurut saudara, apa yang seharusnya dilakukan ?
 Informan : Pendekatan dengan masyarakat, terbuka dan libatkan mamsyarakat. Itu kunci keberhasilan program ini.
 Peneliti : Apakah dalam penggunaan anggaran pemberdayaan kampung dilakukan secara transparan ?
 Informan : Untuk perencanaan biasanya transparan, namun pengelolaannya masih belum transparan menurut *saudara*
 Peneliti : Transparansi dalam bentuk apa ?
 Infforman : Musrenbang kampung, itu bentuk transparan dalam perencanaan.

- Peneliti : Apakah dalam pengelolaan dana sudah melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur sesuai petunjuk penggunaan dana tersebut?
- Informan : sedikitnya, sudah sesuai
- Peneliti : Apakah dana tersebut dalam penggunaan ada mengalami perubahan pembiayaan ?
- Informan : kurang tahu
- Peneliti : Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan usul dalam evaluasi terhadap pelaku program ?
- Informan : Ruang belum terbuka maksimal
- Peneliti : Apakah penggunaan pengelolaan dana pemberdayaan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ?
- Informan : Belum terlalu sesuai
- Peneliti : Apakah dilakukan pembinaan dari pemerintah berupa sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan dana kampung ?
- Informan : Jarang
- Peneliti : Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana selama ini ?
- Informan : Menurut *saudara*, komunikasi dan himbauan, biar masyarakat sadara, juga keterbukaan dari pengelolaan.
- Peneliti : Apabila terdapat masalah seperti yang disampaikan tadi, maka strategi apa yang digunakan oleh saudara untuk menyelesaikannya ?
- Informan : Semua pengelola harus bekerja dengan hati, itu kunci
- Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PNPM Mandiri Pprospek ?
- Informan : Partisipasi kurang
- Peneliti : Baik saudaraku, Terima kasih untuk waktunya. Tuhan berkati
- Informan : Baik ibu, sama-sama.
- Peneliti : (berdiri dan berjabat tangan)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Jayapura

Jln. SPG Teruna Bhakti Waena, Kotak Pos 204 Abepura, Jayapura 99358

Telp 0967 571447 Fax 0967 571090 Email ut-jayapura@ut.ac.id

UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 160/UN31.52/LL/2016
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth : Kepala Kampung Pasir Putih
Distrik Yapen Selatan
Kabupaten Kepulauan Yapen

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Since Atha Wihyawari
Nim : 500660927
Program Studi : S2 Magister Manajemen Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka
UPBJJ-UT : Jayapura

Mahasiswa tersebut pada saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul "Strategi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Prospek pada Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen"

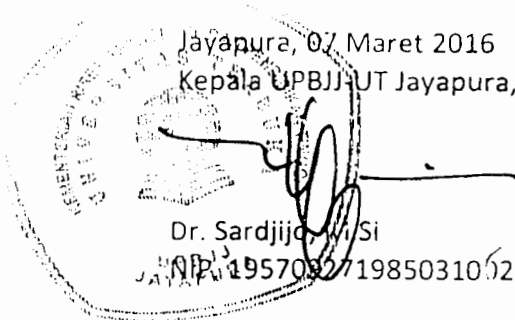
Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian/mengambil data di instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Jayapura, 07 Maret 2016
Kepala UPBJJ-UT Jayapura,

Dr. Sardjito, Si

NIP. 195709271985031062



DAFTAR INFORMAN

NO	KODE INFORMAN	HARI/TGL WAWANCARA	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
01.	01/kps/2016	Rabu	Yosafat Waimbo, SE NIP.	Penata (III/c)	Pelaku Program sebagai PJOK
02.	02/kps/2016	Jumat,	Yohanis Mabuy, SE	Non PNS	Kepala Kampung Pasir Putih
03.	03/Kpsp/2016	Jumat	Barnabas Rerei	Non PNS	Ketua Bamuskam
04.	04/Kpsp/206	Sabtu	Jhony. Y. Nupapati	sda	Wakil Ketua Bamuskam
05.	05/Kpsp/2016	Sabtu	Mince Antaribaba	sda	Anggota bamusskam
06.	06/Kpsp/2016	Sabtu	Yosias Upuya	sda	Anggota bamuskam
07.	07/Kpsp/2016	Minggu Sore	Yanes Taribaba	sda	Anggota bamuskam
08.	08/Kpsp/2016	Minggu Sore	Fredi Mabuy	sda	Kepala Urusan Program
09.	09/Kpsp/2016	Senin	Hugo Tanawani	sda	Kepala Urusan Pembangunan
10.	10/Kpsp/2016	Selasa	Yance Antaribaba	sda	Kepala Urusan Pemerintahan

11.	11/Kpsp/2016	Selasa	Theopilus Nupapati	sda	Kepala Urusan Umum
12.	12/Kpsp/2016	Rabu	Deky Nupapati	sda	Toko Masyarakat
13.	13/Kpsp/2016	Kamis	Marcolyon Mabui	sda	Masyarakat
14.	14/Kpsp/2016	Kamis	Mince Wayoi	sda	Masyarakat
15.	15/Kpsp/2016	Sabtu	Selina Mabuy	sda	Masyarakat
16.	16/Kpsp/2016	Minggu Sore	Susana Mabuy	sda	Toko Perempuan
17.	17/Kpsp/2016	Senin	Elia Paiderouw	sda	Ketua TPKK Kampung Pasir Putih
18.	18/Kpsp/2016	Senin	Herman Wayor	sda	Ketua RW II Kampung Pasir Putih
19.	19-W/IK	Selasa	Daud Arawa	sda	Ketua RW III Kampung Pasir Putih



(Dokumentasi wawancara penulis dengan salah seorang anggota TPKK Kampung Pasir Putih)





(Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Ketua BAMUSKAM Kampung Pasir Putih).

STRUKTUR KAMPUNG PASIR PUTIH

